

AMBIVALENSI CHINA DALAM PROSES REUNIFIKASI KOREA



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional

YUDHO PRASETYA WEMBEN

4517023027

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

AMBIVALENSI CHINA DALAM PROSES REUNIFIKASI KOREA

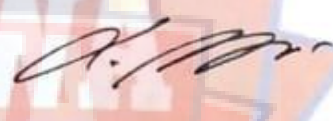
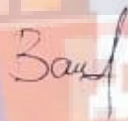
Yudho P Wemben

4517023027

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A.

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Ambivalensi China Dalam Proses Reunifikasi Korea”*. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Atas dasar itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi setiap pembaca dan mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan.

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis selalu di dukung dengan dorongan dan bimbingan serta semangat dari banyak pihak, Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yaitu Yth. Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A. dan Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan teangnya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing penulis juga ingin berterimah kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah membantu penulis dalam perekonomian selama kuliah dan tentunya membantu penulis dalam

doa yang selalu dia Alaskan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. Teruntuk papi dan mami, kalian sangat luar biasa dalam menginspirasi anak-anakmu.

2. Saudara-saudara saya yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis, teruntuk kakakku Yudhi yang selalu memberikan uang kuliah dan uang tambahan, kakakku Yudha yang selalu menghibur dengan bertingkah aneh, adek saya Yughi yang selalu menemani penulis bermain Mobile Legends disaat penulis butuh hiburan, adek saya Yurhi yang merupakan motivasi saya untuk sukses.
3. Yth. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
4. Yth. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar
5. Yth. Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A., selaku dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
6. Yth. Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A., selaku dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
7. Yth. Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A., selaku dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
8. Yth. Ibu Finaliyah Hasan, S.IP., M.A., selaku dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

9. Pak Budi dan Ibu Mega, selaku staff Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah berjasa dalam mengurus admnitistrasi penulis.
10. Teman-teman Angkatan penulis yang berasal dari AIROS dan PRAKSIS yang sudah mendukung sejak awal kuliah sampai selesai.
11. Teman-teman saya di Unibos Youth Choir yang merupakan organisasi paduan suara yang penulis inisiasi untuk menjadi UKM, dan sekarang atas perjuangan dari teman-teman UKM UYC bisa terbentuk dan semoga bisa semakin jaya dengan motto *“Nothing Is Impossible”*
12. Gembala, majelis, dan jemaat, serta teman-teman gereja di GPdi Pintu Elok Makassar yang menjadi support yang baik untuk kebutuhan rohani penulis sekaligus menjadi orang yang ikut serta membantu saya dalam doa selama proses perkuliahaan penulis.
13. Untuk teman-teman seperjuangan saya selama proses kuliah seperti Suardy Ihsan yang selalu memberi saya support dalam mengerjakan tugas selama perkuliahan dan juga setelah saya membeli laptop baru, dia memberikan saya jas hujan untuk penulis pakai melindungi laptop dari air hujan. Suardy pernah berkata “Sudah mi kau nonton spoiler One Piece Yudho kun?”
14. Ajmain, yang menjadi kamus kata baku bagi penulis selama perkuliahan dan sekaligus pencipta puisi yang dalam setiap puisinya

mempunyai makna yang indah. Ajmain pernah berkata “Sekalipun harus merangkak, jika itu tanggung jawab kau harus tuntaskan”

15. Wahyu, teman penulis untuk melemparkan dark jokes yang sangat lucu dan sering membuat penulis tertawa. Wahyu pernah berkata “Adek pipit, ada makan ini eh”

16. Teman-teman penulis yang perempuan seperti Puput, Regita, Windah, Jesy, Imah, Nisa, KD, Ian, Virly, Citra, Riska, Uwi, Riny, Meddy, beserta Feby. Ada beberapa teman lagi intinya penulis berterima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung penulis selama di bangku kuliah.

17. Dan terakhir buat Agnes Buranna yang telah menjadi orang yang selalu mendukung penulis dan selalu menolong penulis dalam banyak hal.

Makassar, 05 Maret 2021

Salam,

Yudho Prasetya Wemben

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
1. Batasan Masalah.....	8
2. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. National Interest.....	14
B. Klasifikasi Kepentingan Nasional :	15
1. Kepentingan Utama	15
2. Minat Sekunder	15

3. Minat Permanen	15
4. Kepentingan Variabel	15
5. Kepentingan Umum.....	16
6. Minat Khusus	16
C. Metode untuk Mengamankan Kepentingan Nasional	17
D. Diplomasi sebagai Sarana Kepentingan Nasional	17
1. Propaganda.....	18
2. Sarana Ekonomi	18
3. Aliansi dan Perjanjian.....	19
4. Cara Pemaksaan	20
BAB III GAMBARAN UMUM.....	25
A. Perang Korea	25
B. Pengembangan Nuklir Korea Utara	28
C. Six Party Talks	29
D. Pencapaian Six Party Talks	39
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
A. Kepentingan China terhadap Korea Utara.....	41
B. Kepentingan Pertahanan	41
C. Kepentingan Ekonomi	44
D. Kepentingan Ketertiban Dunia	46
E. Kepentingan Ideologi.....	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	viii

ABSTRAK

Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II, mengakhiri 35 tahun pendudukan Jepang di Korea dan inilah awal mula negara Korea terpecah belah. Setelah Jepang menyerah dan hampir meninggalkan semua wilayah jajahannya termasuk Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian memutuskan untuk masuk ke negara Korea dimana Uni Soviet mendarat di Korea Utara dan Amerika Serikat mendarat di Korea bagian selatan. Kedua negara, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, datang ke Korea dengan ideologi negaranya masing-masing. Amerika Serikat datang dengan ideologi Liberal dan Uni Soviet datang dengan ideologi Komunis, inilah yang kemudian menjadi pemicu awal perpecahan Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1950, Korea Utara memutuskan untuk menyerang Korea Selatan dan pada akhirnya kedua negara Korea tersebut memutuskan untuk berperang satu sama lain. Sekutu kedua negara Korea, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China, juga ikut ambil bagian dalam perang Korea ini. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun yang diakibatkan dari perang antara dua negara Korea yaitu Korea Selatan dan Korea Utara hingga sekarang. Setelah negara Korea terpecah, Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan nuklirnya sebagai alat pertahanan mereka dari ancaman negara lain dan menjadikan nuklir sebagai alat diplomatik mereka untuk dicapai. Namun, hal inilah yang membuat situasi di Semenanjung Korea semakin memanas, ditambah dengan banyaknya kepentingan negara lain untuk melakukan denuklirisasi proses reunifikasi Korea. Dalam studi ini, penulis mengambil salah satu kepentingan negara dalam denuklirisasi atau dalam proses reunifikasi Korea. Dan penulis memilih China sebagai negara yang memiliki kepentingan di kedua negara tersebut, khususnya Korea Utara. Sikap China yang cenderung ambivalen terhadap Korea Utara membuat penulis melakukan penelitian dengan menggunakan konsep National Interest menurut Donald E. Nuectehertein, penulis kemudian mengumpulkan data terkait apa saja kepentingan China terhadap Korea Utara sehingga hal ini kemudian mempengaruhi kepentingan China. menuju Korea Utara sehingga kemudian mempengaruhi proses Reunifikasi Korea.

Kata Kunci : Ambivalensi, Kepentingan Nasional, Denuklirisasi, Reunifikasi Korea, China



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang abad ke-20, rakyat Korea telah mendambakan pembentukan Korea yang merdeka dan bersatu. Sebelum Perang Dunia II, mereka ditolak oleh aneksasi Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910. Dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945, harapan untuk Korea merdeka yang bersatu kembali muncul tetapi segera pupus oleh pemisahan. Tampaknya divisi sementara untuk mempercepat penyerahan pasukan Jepang, karena kerja sama masa perang antara kekuatan pendudukan dengan cepat berkembang menjadi persaingan pascaperang, pembagian Korea menjadi permanen, dan harapan penyatuan kembali memudar. Sepanjang Perang Korea berikutnya, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai reunifikasi dengan kekerasan tanpa hasil yang menentukan, dan meskipun setelah tahun 1953 reunifikasi secara nominal tetap menjadi agenda kedua Korea, dalam lingkungan Perang Dingin yang semakin tegang, masalah ini hanya mendapat sedikit perhatian.

Keinginan Korea untuk reunifikasi didasarkan pada sejarah persatuan yang panjang dan membanggakan yang membuat Korea berkembang menjadi negara yang homogen secara budaya dan etnis dengan rasa persatuan nasional yang dalam. Ini, dikombinasikan dengan pengaruh Tiongkok yang signifikan, telah menghasilkan orang Korea dengan ketaatan yang kuat pada ikatan keluarga, budaya, dan sejarah. Karena latar belakang ini dan meskipun puluhan tahun ketegangan dan permusuhan antara Utara dan Selatan, orang Korea memiliki keinginan yang kuat untuk reunifikasi. Bagi kebanyakan orang Korea, pembagian semenanjung saat ini adalah penyimpangan sementara yang, seiring waktu, akan teratasi.

Upaya selama Perang Dingin untuk mengatasi permusuhan dan memperoleh tingkat rekonsiliasi sebagai langkah pertama menuju reunifikasi tidak berhasil. Pada tahun 1972 baik Pyongyang dan Seoul secara filosofis sepakat bahwa penyatuan kembali akan terjadi secara damai tanpa campur tangan asing. Pandangan yang berbeda tentang bagaimana hal ini harus dicapai menghambat kemajuan lebih lanjut. Pada tahun 1984 upaya serupa kembali dilakukan tetapi gagal di tengah ketidakpercayaan timbal balik dan karakteristik sengit hubungan Republik of Korea (ROK) -Demokrasi Rakyat Republik Korea (DPRK) selama Perang Dingin. Namun, setelah reunifikasi Jerman, kematian Kim Il Sung pada tahun 1994, dan KTT Semenanjung Korea pada tahun 2000, ada serangkaian prediksi oleh para penstudi, peneliti, dan pemerintah tentang kapan reunifikasi akan terjadi. Sebagian besar penilaian ini berasumsi bahwa penyatuan kembali akan dicapai dengan penyerapan Korea Utara oleh Selatan. Banyak yang melangkah lebih jauh dan meramalkan kapan reunifikasi akan terjadi: pada tahun 1996 direktur Badan Intelijen Pusat AS memperkirakan keruntuhan dalam 3 tahun; awal tahun itu, Komandan AS di Korea memperkirakan keruntuhan dalam "waktu yang sangat singkat" sementara pada tahun 1992, seorang akademisi meramalkan penyatuan kembali "pasti pada tahun 2000; mungkin 1995; mungkin lebih cepat."Menariknya, China tidak memiliki ekspektasi seperti itu akan keruntuhan Korea Utara.

Konflik semenanjung Korea mendapat perhatian bagi banyak negara di belahan dunia dikarenakan khawatirnya mereka kepada Korea Utara yang akhirnya mengembangkan program nuklir yang dibantu oleh Rusia dan China pada tahun 1964, dan selama rentang waktu 10 tahun yang dimulai pada tahun 1993 hingga 2003, Korea Utara kemudian melakukan berbagai tindakan kontroversial yang menimbulkan krisis di Semenanjung Korea. Tercatat Korea Utara sudah melakukan beberapa kali uji coba misil atau rudalnya. Uji coba pertama berlangsung pada bulan Mei 1993, Korea Utara

sukses meluncurkan nuklirnya yang diberi nama “Nodong”. Kemudian pada bulan Agustus 1998, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir Taepodong-1. Dan Berlanjut pada Februari 2003, Korea Utara meluncurkan nuklirnya ke laut Jepang.

Pada bulan Agustus 2003, Tiongkok menginisiasi terbentuknya diplomasi multilateral six party talks yang terdiri dari Korea Utara, Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Rusia dalam rangka mencegah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir yang diadakan di Beijing (Xiaodon Liang, 2012). Namun, peran *Six Party Talks* selama 7 tahun (2003-2009) tidak memiliki dampak secara signifikan dalam mewujudkan denuklirisasi di Korea Utara, keluarnya Korea Utara dalam *Six Party Talks* sebagai tanda berhentinya pula juga pembicaraan ini pada tahun 2009 dan Korea Utara tetap mengembangkan dan melanjutkan program nuklir mereka (Muhammad Nabil, 2014).

Forum Six party talks yang diinisiasi oleh China ini selain memiliki tujuan untuk membuat Korea Utara menghentikan program nuklirnya, forum ini juga mendorong Korea Utara untuk menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan semenanjung korea dan Asia Timur yang damai. Dalam six party talks, berupaya untuk memberikan insentif bagi Korea Utara agar Korea Utara bersedia meninggalkan program nuklirnya. Insentif tersebut berupa pemberian bantuan energi dan ekonomi untuk dikirim ke Korea Utara. Pemberian bantuan energi dan ekonomi kepada Korea Utara pada waktu itu membuat Korea Utara perlahan-lahan meninggalkan program nuklirnya, sehingga membuat stabilitas kawasan Semenanjung Korea pada waktu itu menjadi lebih stabil berkat kehadiran forum Six party talks karena sebagaimana yang tertuang pada salah satu poin dalam Joint Statement bahwa para pihak Six Party Talks yang terkait secara langsung akan menegosiasikan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea pada sebuah

forum terpisah yang sesuai. Selama forum Six party talks Korea Utara melakukan penurunan aktivitas nuklir hingga tahun 2009.

Forum Six party talks juga menjadi tempat beberapa negara untuk menerapkan kepentingan nasional mereka dengan melakukan diplomasi bilateral, seperti halnya Korea Utara yang menuntut kepada Amerika Serikat di era kepemimpinan George W. Bush untuk menghapus Korea Utara sebagai Negara yang mendukung gerakan terorisme. Atas tuntutan tersebut Amerika Serikat kemudian merespon tuntutan tersebut dengan akan menghapus Korea Utara sebagai negara yang mendukung terorisme dengan syarat Korea Utara mengakhiri program nuklir mereka. Amerika Serikat serikat menegosiasikan hal ini untuk mencapai kepentingannya kepada Korea Utara yang dianggap mengganggu kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dan memiliki tujuan untuk menyebarkan demokrasi dan perdagangan bebas di Korea Utara (I.G.N Dwi Putra Justisiawan, 2014).

Amerika Serikat dan China sebenarnya menjadi negara yang paling bisa mewujudkan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea dikarenakan hubungan Amerika Serikat dan China sangat dekat dengan kedua negara Hubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan sudah sangat terlihat jelas bahwa kekuatan Amerika Serikat di Korea Selatan sangatlah dekat, terbukti dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan sehingga upaya untuk melakukan negosiasi dengan Korea Selatan untuk melakukan stabilitas kawasan di Semenanjung Korea bisa diwujudkan namun Amerika Serikat tidak memiliki hubungan yang baik dengan Korea Utara sehingga akan menjadi susah bagi Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan kedua negara Korea secara langsung. Sedangkan China mempunyai hubungan yang baik dengan kedua negara, Korea Utara maupun Korea Selatan merupakan mitra kerjasama bagi China. Bahkan Korea Utara yang dikenakan sanksi oleh PBB masih

mendapat bantuan perdagangan dari China dengan membeli batu bara Korea Utara (Danur,2020),

Sedangkan hubungan China-Korea Selatan sebagian besar mengacu pada hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Republik Korea (Korea Selatan), yang secara resmi didirikan pada tahun 1990-an. Sebelumnya, pemerintah di China daratan hanya mengakui Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) sedangkan Korea Selatan hanya mengakui Republik China (Taiwan). Dalam beberapa tahun terakhir, China dan Korea Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kemitraan strategis dan kooperatif mereka di berbagai sektor, serta mempromosikan hubungan tingkat tinggi. Perdagangan, pariwisata, dan multikulturalisme, khususnya, menjadi faktor terpenting dalam memperkuat kemitraan kerja sama dua negara tetangga.

Secara historis, kedua negara terikat bersama oleh sejarah bersama, tumpang tindih dalam masakan, agama, skrip bahasa dan sistem hukum yang sama, dan hubungan kekerabatan yang mencapai ribuan tahun yang lalu, terutama selama Dinasti Song dan Ming, di mana ia memiliki hubungan yang erat. perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Goryeo dan Dinasti Joseon. Ming dan Joseon muncul setelah invasi bangsa Mongol dan berbagi paham Konfusianisme dekat dalam masyarakatnya. Selanjutnya, Ming telah membantu Joseon selama invasi Toyotomi Hideyoshi ke Korea, di mana Kaisar Wanli mengirimkan total 221.500 pasukan. Joseon juga menggunakan bahasa Cina Klasik sebagai aksara umum di samping bahasa Korea, dan pemerintahan pusatnya meniru sistem Cina .

Hubungan kontemporer antara Cina dan Korea Selatan dicirikan oleh perdagangan ekstensif dan hubungan ekonomi. China sejauh ini adalah mitra dagang terbesar Korea Selatan, dengan China mengimpor barang senilai \$ 160 miliar dari

Korea Selatan pada 2018, yang merupakan 26% dari total ekspor Korea Selatan. 21% dari impor Korea Selatan juga berasal dari China, senilai \$ 107 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2015, China dan Korea Selatan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas bilateral China-Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral tahunan menjadi lebih dari \$ 300 miliar, sementara mengangkat PDB kedua negara. Pada November 2020, China dan Korea Selatan, bersama dengan 13 negara Asia-Pasifik lainnya, menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, perjanjian perdagangan bebas terbesar dalam sejarah yang mencakup 30% populasi dan hasil ekonomi dunia. Meskipun RCEP dianggap sebagai langkah maju yang besar untuk menyatukan ekonomi negara-negara Asia lainnya, China, Korea Selatan, dan Jepang juga terlibat dalam negosiasi jangka panjang untuk perjanjian perdagangan bebas trilateral yang selanjutnya akan mengintegrasikan ekonomi mereka, termasuk negara bebas. pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja.

Kadang-kadang, perselisihan politik masih terjadi antara negara-negara modern Korea Selatan dan Cina. Pada 2016, hubungan terpengaruh ketika Korea Selatan setuju untuk mengerahkan THAAD, sistem pertahanan rudal anti-balistik Amerika, yang diduga dimaksudkan untuk Korea Utara, tetapi tindakan yang sangat ditentang China. China memberlakukan boikot tidak resmi terhadap Korea Selatan dalam upaya untuk menghentikan mereka menyebarkan sistem rudal. Namun, pada akhir Oktober 2017, kedua negara mengakhiri perselisihan diplomatik mereka dan telah bekerja dengan cepat untuk mengembalikan hubungan mereka ke jalur semula, memperkuat pertukaran dan kerja sama antara satu sama lain, menciptakan harmoni kepentingan, dan sepakat untuk melanjutkan pertukaran dan kerja sama. di semua area. Semua larangan ekonomi dan budaya dari China terhadap Korea Selatan juga dicabut sebagai hasilnya, dengan

kerjasama politik dan keamanan, bisnis dan pertukaran budaya antara kedua negara kembali ke keadaan sehat dan positif.

Setelah hubungan dimulai kembali, China dan Korea Selatan telah menyelenggarakan kunjungan presiden dan pemerintah, bekerja sama di Semenanjung Korea, membantu pembangunan negara lain, dan bekerja sama di berbagai bidang. Selain itu, mengingat meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat yang telah meningkat selama pemerintahan Trump, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menyatakan bahwa negaranya akan tetap netral, dan bahwa ia bersedia untuk meningkatkan hubungan positif dan mempromosikan hubungan baik. pertukaran tingkat dengan China, karena negara menganggap hubungan seperti itu 'sama pentingnya' (Steven Denney, 2015).

Hubungan China yang begitu dekat dengan kedua negara Korea membuat China menjadi negara yang kuat untuk menjadi mediator bagi kedua negara Korea untuk melakukan negosiasi terkait menstabilkan situasi keamanan di Semenanjung Korea serta menekan Korea Utara untuk melakukan penghentian program nuklirnya agar reunifikasi Korea dapat terwujud. Namun China yang menginisiasi forum six party talks telah gagal dalam mewujudkan proses denuklirisasi sehingga Korea Utara hingga kini masih mengembangkan nuklirnya dan membuat stabilitas kawasan Semenanjung Korea masih memanas. Terlebih lagi sikap China terhadap Korea Utara yang selalu tidak konsisten dalam mengambil arah kebijakan terkait pengembangan dan percobaan nuklir Korea Utara, China yang awalnya memberlakukan sanksi pada awal-awal setelah resolusi disepakati kemudian melonggarkan sanksinya dibulan-bulan setelahnya (Ruhmiyati dan Indrawati, 2016).

Dari kegagalan China menjadi mediator di Six party talks dan tidak tegas dalam mengambil kebijakan tegas terkait pemberian sanksi kepada Korea Utara membuat penulis menyimpulkan sebuah hipotesa bahwa China dalam hal ini mempunyai kepentingan terhadap Korea Utara sehingga dalam setiap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak sepenuhnya diterapkan oleh China terhadap Korea Utara seperti resolusi 1874 tahun 2009 dan resolusi 1874 tahun 2009 yang mengatur mengenai embargo semua jenis senjata ke Korea Utara, namun China tetap mengekspor senjata ke Korea Utara pada tahun 2010 (Nur Afyiah,2017)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini akan membahas Ambivalensi China terhadap Korea Utara dalam periode 2014-2019 untuk mengetahui keseriusan China dalam mendukung program denuklirisasi Korea Utara yang akan berdampak pada stabilitas kawasan Semenanjung Korea.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini merumuskan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut;

1. Mengapa China bersifat ambivalen terhadap Korea Utara yang berdampak pada proses reunifikasi Korea?

C. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai reunifikasi Korea yang saat ini masih belum menemui titik terang dikarenakan stabilitas kawasan Semenanjung Korea yang masih memanas sampai saat ini yang disebabkan oleh masih aktifnya Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya. Penelitian ini juga ingin melihat alasan China yang

tidak tegas dan konsisten dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya terhadap Korea Utara, serta bertujuan untuk menganalisa seberapa penting Korea Utara bagi China.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, pertama, menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa. Kedua, penelitian ini akan menjadi sebuah pemasukan baru bagi Ilmu Hubungan Internasional dan para penstudi yang meneliti terkait penelitian serupa. Dan terakhir adalah menjadi bahan pertimbangan dalam melihat politik luar negeri dan kepentingan suatu negara terhadap negara lain.

D. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan berfikir dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang akan membantu dalam menganalisa bagaimana Bagaimana sikap China terhadap Korea Utara pasca Six party talks (Periode 2014 – 2019), yaitu menggunakan teori *National Interest*.

'Kepentingan Nasional' adalah konsep kunci dalam Hubungan Internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri setiap negara dirumuskan atas dasar kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hak setiap negara yang diterima secara universal untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Suatu negara selalu berusaha untuk menjustifikasi tindakannya atas dasar kepentingan nasionalnya. Perilaku suatu negara selalu dikondisikan dan diatur oleh kepentingan nasionalnya.

Dalam merumuskan Kepentingan Nasional dapat dilihat dari dua kepentingan dasar yaitu Kepentingan Vital dan Kepentingan Non Vital :

- **Kepentingan Vital**

Menurut Morgenthau, komponen vital dari kepentingan nasional yang ingin diamankan oleh kebijakan luar negeri adalah kelangsungan hidup atau identitas. Dia membagi identitas menjadi tiga bagian: Identitas fisik. Identitas Politik dan Identitas Budaya. Identitas fisik termasuk identitas teritorial. Identitas politik adalah sistem politik-ekonomi dan identitas budaya merupakan nilai-nilai sejarah yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian dari warisan budayanya. Ini disebut komponen vital karena sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperiksa. Suatu bangsa bahkan memutuskan berperang untuk mengamankan atau melindungi kepentingan vitalnya.

Suatu negara selalu merumuskan keputusan politik luar negerinya dengan tujuan untuk mengamankan dan memperkuat keamanannya. Upaya untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, yang sedang dilakukan oleh negara-negara saat ini, sedang dilakukan karena saat ini keamanan setiap negara terkait erat dengan perdamaian dan keamanan internasional. Keamanan, dengan demikian, merupakan komponen vital dari kepentingan nasional. Setiap bangsa selalu berusaha mengamankan kepentingan vitalnya bahkan dengan cara perang.

- **Kepentingan Non Vital**

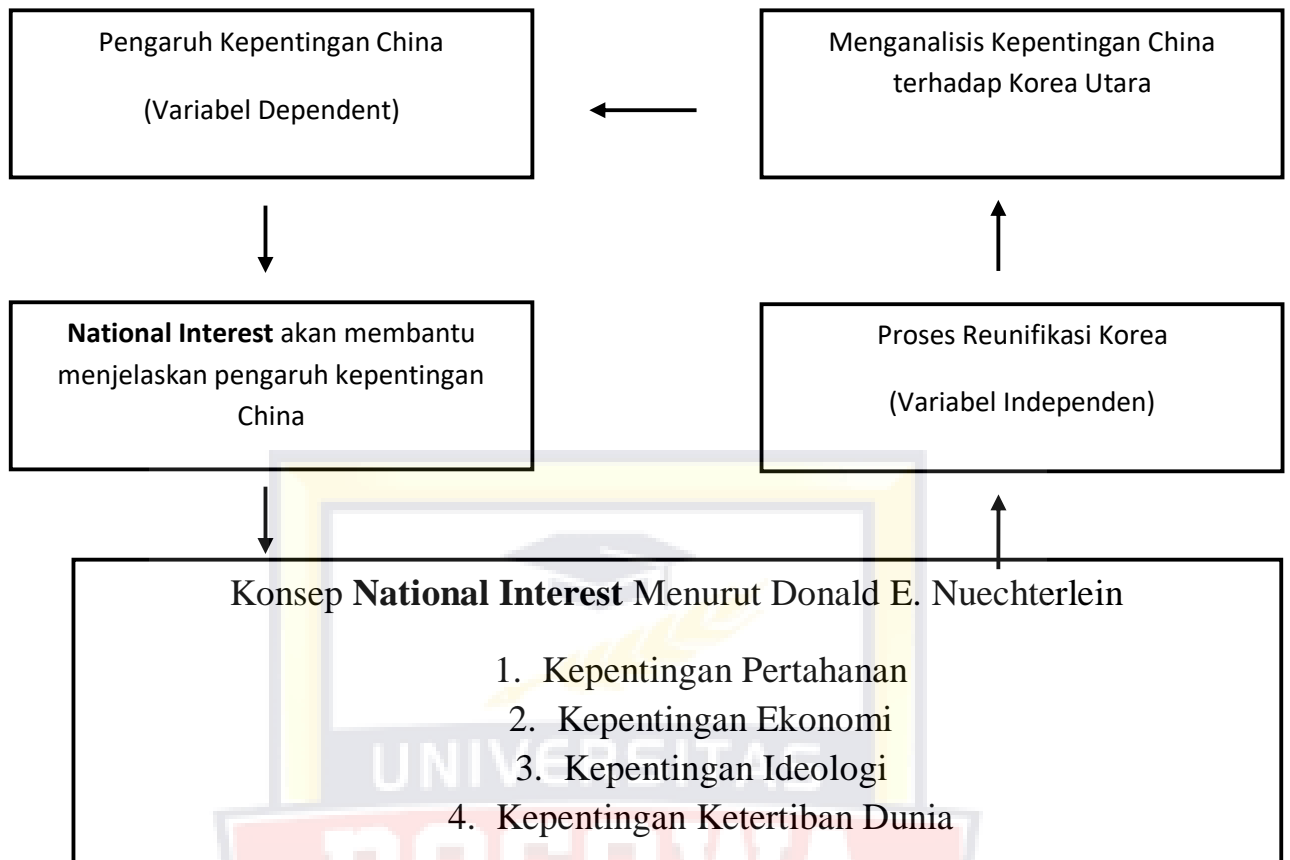
Komponen non vital adalah bagian kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun kebutuhan pengamanan komponen vital. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor pembuat keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan kelompok atau kelompok, dan jalan rakyat politik dan moral. "Kepentingan variabel ini adalah keinginan masing-masing negara yang, tidak diragukan lagi, ingin mereka lihat

terpenuhi tetapi untuk itu mereka tidak akan berperang. Sementara kepentingan vital dapat diambil sebagai tujuan, kepentingan sekunder dapat disebut sebagai tujuan kebijakan luar negeri. "

Tujuan-tujuan ini telah didaftarkan oleh VV Dyke dan daftarnya meliputi: Kemakmuran, Perdamaian, Ideologi, Keadilan, Gengsi, Kebesaran, dan Kekuasaan. Meskipun setiap negara bagian mendefinisikan tujuan ini dengan cara yang sesuai dengan kepentingannya dalam keadaan yang berubah, namun tujuan ini dapat digambarkan sebagai tujuan yang umum di hampir semua negara bagian. Dengan demikian, kepentingan nasional yang ingin diamankan oleh suatu negara secara umum dapat dikategorikan menjadi dua bagian ini (Diesh, 2017).

Dalam konteks Kepentingan China terhadap Korea Utara, penulis menggunakan National Interest menurut Donald E. Nuechterlein yang mengatakan bahwa dasar sebuah kebijakan luar negeri mempunyai kepentingan nasional yang dapat digambarkan seperti ini: **Kepentingan pertahanan**, perlindungan negara terhadap warganya dari ancaman kekerasan fisik yang datang dari negara lain. **Kepentingan ekonomi**, peningkatan ekonomi negara untuk kesejahteraan negara dan dalam hubungan dengan negara bagian lain. **Kepentingan Ketertiban Dunia**, pemeliharaan politik internasional dan sistem ekonomi di mana negaranya bisa merasa aman, dan di mana warga dan perdagangannya dapat beroperasi dengan damai di luar perbatasannya. dan **Kepentingan ideologi**, perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh orang-orang dari suatu negara.

Alasan penulis menggunakan teori *National Interest* untuk membantu penulis menjelaskan dalam menganalisa kepentingan China terhadap Korea Utara melalui setiap sikap China yang tidak tegas terhadap Korea Utara dan cenderung melonggarkan sanksi yang telah disepakati oleh PBB.



Mengacu pada Gambar 1.1 dalam menjawab rumusuan penulis yaitu, Kepentiingan China terhadap Korea Utara (Periode 2014-2019). Teori National Interest sebagai pisau analisis adalah teori yang tepat dalam menjawabnya. Korelasi antara variabel independent dan variabel dependent penelitian ini sangat jelas dilihat melalui teori ini. Dalam melihat bagaimana pengaruh kepentingan China terhadap reunifikasi Korea dengan megacu pada arah kebijakan politik luar negeri China terhadap Korea Utara, sangat tepat dan cocok untuk menggunakan teori National Interest menurut Donald E. Nuechterlein

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif yaitu tipe penelitian sosial yang menggambarkan fenomena yang diteliti seobjektif mungkin berdasarkan sudut pandang dan analisa yang digunakan oleh peneliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen melalui buku teks maupun elektronik, jurnal, media massa, dan situs resmi organisasi dan pemerintahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka dengan menelusuri berbagai literature seperti buku, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variable yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data dari penelitian ini memakai teknik analisa kualitatif, dimana analisa ini bersifat bukan pada penekanan pada data-data non matematis. Analisa ini digunakan segala data yang didapatkan baik dalam hasil wawancara maupun telaah pustakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan konsep yang akan dipakai untuk menjawab variabel dependen atau rumusan masalah pada penelitian ini. Konsep yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah konsep *National Interest*.

A. National Interest

Kepentingan Nasional adalah istilah yang kabur dan rancu yang memiliki makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Negarawan dan pembuat kebijakan selalu menggunakannya dengan cara yang sesuai untuk mereka dan dengan tujuan mereka untuk membenarkan tindakan negara mereka. Hitler membenarkan kebijakan ekspansionis atas nama "kepentingan nasional Jerman".

Para presiden AS selalu membenarkan keputusan mereka untuk mengembangkan senjata yang lebih banyak dan lebih merusak demi kepentingan "kepentingan nasional AS". Untuk membangun pangkalan nuklir yang kuat di Diego Garcia dibenarkan oleh AS atas nama memenuhi tantangan yang diajukan oleh Uni Soviet sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan AS di Samudra Hindia. Selama 1979-89, (dulu) Uni Soviet membenarkan intervensinya di Afghanistan atas nama "kepentingan nasional Soviet".

China membenarkan sengketa perbatasannya dengan India dan Uni Soviet atas nama upaya untuk mengamankan kepentingan nasional China. Sekarang negara-negara P-5 berbicara tentang Non-proliferasi dan pengendalian senjata dalam kaitannya dengan kepentingan nasional semua bangsa.

Semua ini dan banyak lagi contoh dapat dikutip untuk menekankan ambiguitas yang melingkupi konsep Kepentingan Nasional. Ketidakjelasan ini menghalangi proses perumusan definisi Kepentingan Nasional yang diterima secara universal. Namun,

beberapa ahli telah mencoba untuk mendefinisikan Kepentingan Nasional (Jemadu, 2008).

B. Klasifikasi Kepentingan Nasional

Untuk lebih tepat dalam memeriksa kepentingan yang ingin diamankan oleh suatu negara, Thomas W. Robinson menyajikan enam klasifikasi kepentingan yang coba diamankan oleh negara-negara tersebut (Perwita & Yani, 2005)..

1. Kepentingan Utama

Ini adalah kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dikompromikan oleh negara mana pun. Ini mencakup pelestarian identitas fisik, politik dan budaya dari kemungkinan perambahan oleh negara lain. Sebuah negara harus mempertahankan ini dengan segala cara.

2. Minat Sekunder

Ini kurang penting dibandingkan dengan kepentingan utama. Kepentingan Sekunder cukup vital bagi eksistensi negara. Ini termasuk perlindungan warga negara di luar negeri dan memastikan kekebalan diplomatik untuk staf diplomatic.

3. Minat Permanen

Ini mengacu pada kepentingan jangka panjang negara yang relatif konstan. Ini dapat berubah sangat lambat. Kepentingan AS untuk melestarikan wilayah pengaruhnya dan untuk mempertahankan kebebasan navigasi di semua samudra adalah contoh kepentingan tersebut.

4. Kepentingan Variabel

Kepentingan tersebut adalah kepentingan suatu bangsa yang dianggap vital bagi kepentingan nasional dalam situasi tertentu. Dalam pengertian ini, hal ini dapat berbeda dari kepentingan primer dan permanen. Kepentingan variabel sebagian besar ditentukan oleh "arus lintas kepribadian, opini publik, kepentingan bagian, politik partisan, dan jalan rakyat politik dan moral."

5. Kepentingan Umum

Kepentingan umum suatu negara mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau dalam beberapa bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dll. Menjaga perdamaian internasional adalah kepentingan umum semua bangsa. Serupa dengan kasus pelucutan senjata dan pengendalian senjata.

6. Minat Khusus

Ini adalah hasil logis dari kepentingan umum dan ini didefinisikan dalam istilah ruang dan waktu. Untuk mengamankan hak-hak ekonomi negara-negara Dunia Ketiga melalui pengamanan Tatanan Ekonomi Internasional Baru adalah kepentingan khusus India dan negara-negara berkembang lainnya.

7. Minat Internasional

Selain enam kategori kepentingan nasional tersebut, TW Robinson juga mengacu pada tiga kepentingan internasional — kepentingan yang identik, kepentingan yang saling melengkapi, dan kepentingan yang saling bertentangan. Kategori pertama mencakup kepentingan yang umum di sejumlah besar negara bagian; kategori kedua mengacu pada kepentingan-kepentingan tersebut, yang meskipun tidak identik, dapat menjadi dasar kesepakatan atas beberapa hal tertentu; dan kategori ketiga mencakup kepentingan yang tidak saling melengkapi atau identik.

Namun, klasifikasi ini tidak mutlak dan juga tidak lengkap. Kepentingan yang saling melengkapi dapat, seiring berjalannya waktu, menjadi kepentingan yang identik dan kepentingan yang bertentangan dapat menjadi kepentingan yang saling melengkapi. Studi tentang kepentingan nasional suatu bangsa melibatkan pemeriksaan terhadap semua komponen vital dan non-vital dari kepentingan nasional. Skema klasifikasi enam kali lipat yang ditawarkan oleh TW Robinson dapat sangat membantu

kami untuk menganalisis kepentingan nasional semua negara. Studi semacam itu dapat membantu kita untuk memeriksa perilaku negara-negara dalam hubungan internasional

C. Metode untuk Mengamankan Kepentingan Nasional

Untuk mengamankan maksud dan tujuan kepentingan nasionalnya adalah hak dan kewajiban tertinggi setiap bangsa. Bangsa-bangsa selalu bekerja untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dan dalam melakukan itu mereka mengadopsi sejumlah metode (Rudy, 2002).

1. Diplomasi sebagai Sarana Kepentingan Nasional

Diplomasi adalah cara yang diterima secara universal untuk mengamankan kepentingan nasional. Melalui diplomasi itulah kebijakan luar negeri suatu negara bergerak ke negara lain. Ini berusaha untuk mengamankan tujuan kepentingan nasional. Diplomat menjalin kontak dengan pengambil keputusan dan diplomat negara lain dan melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dari kepentingan nasional bangsanya.

Seni diplomasi melibatkan penyajian maksud dan tujuan kepentingan nasional sedemikian rupa sehingga dapat membujuk orang lain untuk menerimanya sebagai tuntutan yang adil dan sah dari bangsa. Diplomat menggunakan persuasi dan ancaman, penghargaan dan ancaman penolakan penghargaan sebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan dan mengamankan tujuan kepentingan nasional sebagaimana ditentukan oleh kebijakan luar negeri bangsa mereka.

Negosiasi diplomatik merupakan cara paling efektif untuk menyelesaikan konflik dan untuk mendamaikan kepentingan negara yang berbeda. Melalui saling memberi dan menerima, akomodasi dan rekonsiliasi, diplomasi berusaha untuk mengamankan tujuan dan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan nasional.

Sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional, diplomasi adalah cara yang diakui secara universal dan paling sering digunakan. Morgenthau menganggap diplomasi sebagai sarana paling utama. Namun demikian, semua maksud dan tujuan kepentingan nasional tidak dapat diamankan melalui diplomasi.

2. Propaganda

Metode penting kedua untuk mengamankan kepentingan nasional adalah propaganda. Propaganda adalah seni berjualan. Ini adalah seni meyakinkan orang lain tentang kebenaran tujuan dan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Ini terdiri dari upaya untuk memberi kesan kepada bangsa-bangsa tentang perlunya mengamankan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa.

"Propaganda adalah upaya sistematis untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok tertentu untuk tujuan publik tertentu." —Frankel

Ini secara langsung ditujukan kepada orang-orang di negara lain dan tujuannya selalu untuk mengamankan kepentingan pribadi — kepentingan yang diatur secara eksklusif oleh kepentingan nasional para propagandis. Perkembangan revolusioner alat komunikasi (internet) belakangan ini telah meningkatkan cakupan dakwah sebagai alat untuk mengamankan dukungan terhadap tujuan kepentingan nasional.

3. Sarana Ekonomi

Negara kaya dan maju menggunakan bantuan ekonomi dan pinjaman sebagai alat untuk mengamankan kepentingan mereka dalam hubungan internasional. Adanya jurang yang sangat lebar antara negara kaya dan miskin memberikan peluang besar bagi negara kaya untuk mempromosikan kepentingannya vis-a-vis negara miskin.

Ketergantungan negara miskin dan kurang berkembang pada negara kaya dan maju untuk impor barang-barang industri, pengetahuan teknologi, bantuan asing, persenjataan dan untuk menjual bahan mentah, telah bertanggung jawab untuk

memperkuat peran instrumen ekonomi asing. kebijakan. Dalam era Globalisasi ini perilaku hubungan ekonomi internasional telah muncul sebagai alat kunci kepentingan nasional.

4. Aliansi dan Perjanjian

Aliansi dan Perjanjian dibuat oleh dua atau lebih negara bagian untuk mengamankan kepentingan bersama mereka. Perangkat ini banyak digunakan untuk mengamankan kepentingan yang identik dan saling melengkapi. Namun, bahkan kepentingan konfliktual dapat mengarah pada aliansi dan perjanjian dengan negara-negara yang berpikiran sama melawan saingan atau lawan yang sama.

Aliansi dan perjanjian menjadikannya kewajiban hukum bagi anggota aliansi atau penandatanganan perjanjian untuk bekerja demi kepentingan bersama yang disepakati. Aliansi dapat disimpulkan untuk melayani kepentingan tertentu atau untuk mengamankan sejumlah kepentingan bersama. Sifat aliansi bergantung pada sifat kepentingan yang ingin diamankan.

Oleh karena itu, aliansi tersebut bersifat militer atau ekonomi. Kebutuhan untuk mengamankan keamanan negara demokrasi kapitalis dari 'ancaman komunis' yang meluas mengarah pada pembentukan aliansi militer seperti NATO, SEATO, CENTO, ANZUS dll. Demikian pula, kebutuhan untuk memenuhi ancaman terhadap sosialisme mengarah pada kesimpulan Warsawa Pakta antar negara komunis.

Perlunya rekonstruksi ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua menyebabkan terbentuknya Pasar Bersama Eropa (Sekarang Uni Eropa) dan beberapa lembaga ekonomi lainnya. Kebutuhan kepentingan nasional India pada tahun 1971 mengarah pada kesimpulan Perjanjian Perdamaian, Persahabatan dan Kerja Sama dengan (dulu) Uni Soviet. Aliansi dan Perjanjian dengan demikian merupakan cara yang populer untuk mengamankan kepentingan nasional.

5. Cara Pemaksaan

Peran kekuasaan dalam hubungan internasional merupakan fakta yang diakui. Ini adalah hukum hubungan internasional yang tidak tertulis bahwa negara-negara dapat menggunakan kekerasan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Hukum Internasional juga mengakui cara koersif short of war sebagai metode yang dapat digunakan oleh negara untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Intervensi, Non-persetubuhan, embargo, boikot, pembalasan, pembalasan, pembalasan, pemutusan hubungan dan biosida pasifik adalah cara pemaksaan populer yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk memaksa orang lain menerima suatu tindakan tertentu atau untuk menahan diri dari suatu kursus yang dianggap merugikan bangsa dengan cara-cara koersif.

Perang dan Agresi telah dinyatakan sebagai cara ilegal, namun cara ini terus digunakan oleh negara-negara dalam hubungan internasional yang sebenarnya. Saat ini, negara-negara sepenuhnya menyadari pentingnya sarana penyelesaian konflik yang damai seperti negosiasi, dan diplomasi sebagai metode ideal untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Namun pada saat yang sama, mereka terus menggunakan cara-cara koersif, kapan pun mereka merasa perlu dan perlu. Kekuatan militer masih dianggap sebagai bagian utama dari kekuatan nasional dan sering digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan maksud dan tujuan yang diinginkannya.

Penggunaan kekuatan militer untuk melawan terorisme internasional sekarang diterima secara universal sebagai cara yang wajar dan adil untuk memerangi ancaman tersebut. Saat ini opini publik dunia menerima penggunaan perang dan cara paksa lainnya untuk memberantas terorisme internasional.

Semua cara ini digunakan oleh semua bangsa untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Bangsa memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan

kepentingan nasional mereka dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih sarana yang diperlukan untuk tujuan ini. Mereka dapat menggunakan cara-cara damai atau koersif jika mereka menginginkan atau dianggap penting.

Namun, demi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran internasional, negara-negara diharapkan menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara koersif dalam perang dan agresi tertentu. Ini diharapkan bergantung pada cara damai untuk penyelesaian perselisihan dan untuk mengamankan kepentingan mereka.

Sementara merumuskan tujuan dan sasaran kepentingan nasional, semua negara harus melakukan upaya yang jujur untuk membuatnya sesuai dengan kepentingan internasional Perdamaian, Keamanan perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia dan Pembangunan Berkelanjutan.

Hidup berdampingan secara damai, resolusi konflik yang damai, dan kerja sama yang bertujuan untuk pembangunan adalah kepentingan bersama dan bersama dari semua bangsa. Dengan demikian, seiring dengan promosi kepentingan nasional mereka, negara-negara tersebut harus berusaha melindungi dan mempromosikan kepentingan bersama demi kepentingan yang lebih besar dari seluruh komunitas internasional.

Semua ini membuat penting bagi setiap negara untuk merumuskan politik luar negerinya dan untuk melakukan hubungan dengan negara lain atas dasar kepentingan nasionalnya, sebagaimana ditafsirkan dan didefinisikan selaras dengan kepentingan bersama umat manusia. Tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mengamankan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dari kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatan nasional.

Menurut Donald E. Nuechterlein dalam perspektif hubungan internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebenarnya bertumpu pada kepentingan nasional. Nuechterlin menyatakan bahwa

kepentingan nasional suatu negara dipengaruhi oleh faktor pertahanan, ekonomi, ketertiban dunia, dan ideologi yang digambarkan seperti ini, :

- Kepentingan *pertahanan*: perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan / atau ancaman yang datang dari negara lain.
- Kepentingan *ekonomi*: peningkatan ekonomi negara-bangsa kesejahteraan dalam hubungan dengan negara bagian lain.
- Kepentingan *Ketertiban Dunia*: pemeliharaan politik internasional dan sistem ekonomi di mana negara-bangsa mungkin merasa aman, dan dimana warga dan perdagangannya dapat beroperasi dengan damai di luar perbatasannya.
- Kepentingan *ideologi*: perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh orang-orang dari suatu negara.

Mengacu pada teori *National Interest* diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori ini sebagai pisau analisis penulis dalam membantu penulis menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penulis memilih teori ini karena teori ini memberikan sudut pandang kebijakan politik luar negeri yang lebih luas dan mendalam. Pertama, teori *National Interest* membahas tentang alasan suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang akan membantu penulis dalam melihat kebijakan politik luar negeri China. Kedua, teori ini mempunyai dasar yang dipengaruhi oleh kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomoi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologis yang akan membantu penulis menganalisa setiap kebijakan politik luar negeri China terhadap Korea Utara yang berpengaruh terhadap reunifikasi Korea.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, dalam beberapa literatur yang mengangkat fenomena kebijakan politik luar negeri China terkhusus pengaruh

kepentingan China terhadap reunifikasi Korea, secara eksplisit, penulis berusaha mengembangkan dalam menganalisa kepentingan China terhadap Korea Utara dalam periode 2014-2019. Hal tersebut yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya

Namun, penulis tetap menjadikan beberapa acuan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya menjadi penting bagi penulis untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri China terhadap Korea Utara yang berpengaruh pada reunifikasi Korea.



Tabel 2.1. Rangkuman dan Pemetaan beberapa literatur yang relevant sebagai acuan penelitian ini

No.	Penelitian	Konsep	Temuan
1.	<p>Dampak Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015</p> <p>Oleh : Nur Afiah Isnaeni</p>	<p>Hubungan Bilateral</p>	<p>Menjelaskan bahwa Proliferasi nuklir Korea Utara memberikan banyak dampak buruk terhadap hubungannya dengan China. Ikatan antara Korea Utara dengan Tiongkok tidak lagi terlihat paska uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga tahun 2013. Tiongkok tidak lagi memberikan dukungan kepada Korea Utara pada Resolusi 2094 yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB akibat uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga. Perubahan kebijakan luar negeri China menandakan adanya pergeseran</p>
2.	<p>Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Korea Utara Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Pasca Six Party Talks (Periode 2009-2013)</p> <p>Oleh : Arya Wirawan M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Nasional • Diplomasi Preventif • Regional security complex 	<p>upaya diplomasi bilateral yang China lakukan dinilai sebagai langkah tepat untuk terus menciptakan upaya denuklirisasi Korea Utara. Diplomasi seperti penguatan kerjasama politik dan ekonomi merupakan faktor yang signifikan untuk bisa terus menjaga Korea Utara agar tidak lagi mengembangkan nuklirnya demi menjaga stabilitas keamanan kawasan</p>

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Perang Korea

Konflik antara Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan) di mana sedikitnya 2,5 juta orang kehilangan nyawa. Perang mencapai proporsi internasional pada Juni 1950 ketika Korea Utara, dipasok dan dinasehati oleh Uni Soviet untuk menginvasi Selatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Amerika Serikat sebagai peserta utama, ikut berperang di pihak Korea Selatan, dan Republik Rakyat China datang membantu Korea Utara. Setelah lebih dari satu juta korban pertempuran telah diderita di kedua belah pihak, pertempuran berakhir pada Juli 1953 dengan Korea masih terbagi menjadi dua negara yang bermusuhan. Negosiasi pada tahun 1954 tidak menghasilkan kesepakatan lebih lanjut, dan garis depan telah diterima sejak saat itu sebagai batas de facto antara Korea Utara dan Selatan (Agus, 2012)..

Perang Korea berawal dari runtuhnya Kekaisaran Jepang pada akhir Perang Dunia II pada bulan September 1945. Tidak seperti Tiongkok, Manchuria, dan bekas koloni Barat yang direbut oleh Jepang pada tahun 1941–1942, Korea, yang dianeksasi ke Jepang sejak 1910, tidak memiliki pemerintahan asli atau rezim kolonial yang menunggu untuk kembali setelah permusuhan berhenti. Sebagian besar penggugat kekuasaan adalah orang buangan di China, Manchuria, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Mereka terbagi dalam dua kategori besar. Yang pertama terdiri dari kaum revolusioner Marxis yang berkomitmen yang telah melawan Jepang sebagai bagian dari pasukan gerilya yang didominasi Cina di Manchuria dan Cina. Salah satu dari orang buangan ini adalah seorang pemimpin gerilya kecil tapi sukses bernama Kim Il-sung, yang telah menerima beberapa pelatihan di Rusia dan menjadi jurusan tentara

Soviet. Gerakan nasionalis Korea lainnya, yang tidak kalah revolusionernya, mendapatkan inspirasi dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan industrialisme terbaik di Eropa, Jepang, dan Amerika. Para "ultranasionalis" ini terpecah menjadi faksi-faksi saingan, yang salah satunya berpusat Syngman Rhee, berpendidikan di Amerika Serikat dan pernah menjadi presiden dari Pemerintahan Sementara Korea di pengasingan (Kathryn, 1993).

Dalam upaya tergesa-gesa untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan penduduk Jepang di Korea (diperkirakan 700.000), Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat pada Agustus 1945 untuk membagi negara untuk tujuan administratif di Paralel ke-38 (lintang 38° LU). Setidaknya dari perspektif Amerika, pembagi geografis ini berguna untuk sementara waktu; namun, Soviet memulai pemerintahan teror yang berumur pendek di Korea utara yang dengan cepat mempolitisasi divisi tersebut dengan mendorong ribuan pengungsi ke selatan.

Kedua belah pihak tidak dapat menyetujui formula yang akan menghasilkan Korea bersatu, dan pada tahun 1947 Presiden AS Harry S. Truman membujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memikul tanggung jawab atas negara, meskipun militer AS tetap memegang kendali atas Selatan sampai tahun 1948. Baik polisi nasional Korea Selatan dan kepolisian bertambah dua kali lipat, menyediakan pasukan keamanan selatan sekitar 80.000 pada tahun 1947. Sementara itu, Kim Il-sung memperkuat kontrolnya atas Partai Komunis serta struktur administrasi utara dan kekuatan militer. Pada tahun 1948, militer dan polisi Korea Utara berjumlah sekitar 100.000, diperkuat oleh sekelompok gerilyawan Korea Selatan yang bermarkas di Haeju di Korea barat (Yang Seung Yoon & Mohtar Mas, 2004).

Pembentukan Korea Selatan yang merdeka menjadi kebijakan PBB pada awal 1948. Komunis Selatan menentang ini, dan pada musim gugur peperangan partisan telah melanda sebagian dari setiap provinsi Korea di bawah garis paralel ke-38. Pertempuran tersebut meluas menjadi perang perbatasan terbatas antara Korea Selatan yang baru dibentuk Tentara Republik Korea atau yang disebut dengan ROKA dan kepolisian perbatasan Korea Utara serta Korea Utara Tentara Rakyat Korea yang disebut dengan KPA. Korea Utara melancarkan 10 serangan gerilya lintas batas untuk menarik unit ROKA menjauh dari kampanye penindasan gerilya mereka di Selatan.

Dalam tujuan yang lebih besar, pemberontakan partisan gagal: Republik Korea (ROK) dibentuk pada Agustus 1948, dengan Syngman Rhee sebagai presiden. Namun demikian, hampir 8.000 anggota pasukan keamanan Korea Selatan dan setidaknya 30.000 orang Korea lainnya kehilangan nyawa. Banyak dari para korban sama sekali bukan pasukan keamanan atau gerilyawan bersenjata, tetapi hanya orang-orang yang diidentifikasi sebagai "sayap kanan" atau "merah" oleh pihak yang berperang. Kekejaman skala kecil menjadi gaya hidup.

Perang partisan juga menunda pelatihan tentara Korea Selatan. Pada awal 1950, penasihat Amerika menilai bahwa kurang dari setengah dari batalyon infanteri ROKA bahkan sedikit siap untuk perang. Bantuan militer AS sebagian besar terdiri dari kelebihan senjata ringan dan persediaan. Memang, Jenderal Douglas MacArthur, komandan Komando Timur Jauh Amerika Serikat (FECOM), berpendapat bahwa Tentara Kedelapannya, yang terdiri dari empat divisi lemah di Jepang, membutuhkan lebih banyak dukungan daripada Korea.

Setelah Uni Soviet memutuskan untuk turun tangan, Korea Selatan dan Korea Utara barulah kemudian memulai perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953 dan Perjanjian ini diberi Perjanjian Panmunjom. Hal ini yang kemudian menjadi pertanda berakhirnya Perang Korea dan perjanjian ini pulalah yang membuat kita mengenal dua Korea hingga sekarang yaitu Korea Selatan dan Korea Utara bahkan Korea Utara tetap gigih mempertahankan ideologi komunisnya meski sejarah runtuhnya Uni Soviet sudah terlihat (Henry Hafidz, 2018).

B. Pengembangan Nuklir Korea Utara

Pengembangan nuklir Korea Utara dimulai sejak 1970, Ketika itu Korea Utara memutuskan untuk bekerja sama dengan Uni Soviet untuk membangun rudal yang mempunyai jangkauan sekitar 300 kilometer, dan melakukan tes nuklir pertamanya pada tahun 1984. Pada tahun 1987-1992, Pengembangan nuklir Korea Utara semakin berkembang dengan menghadirkan rudal jarak jauh yang bernama Taepodong-1 yang mempunyai jarak tempuh 2.500 Km dan Taepodong-2 yang mempunyai jarak tempuh 6.700 Km (Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, 2008).

Pada tahun 2005 dalam mengakhiri moratorium, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Bush yang mempunyai kebijakan anti Korea Utara kemudian membuat Korea Utara tak ambil pusing dan terus melakukan uji coba nuklirnya Kembali pada 9 Oktober 2006. Pada Mei 2009, Korea Utara Kembali melakukan tes nuklir di bawah tanah dan kekuatan daya ledak nuklir ini lebih kat daripada yang pertama.

Pada Desember 2011, Kim Jong Un kemudia menggantikan ayahnya Kim Jong II dan mulai mengawasi percobaan nuklir ketiga. Di bulan Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang keempat dan kembali melakukannya melalui bawah tanah dengan sebutan bom hidrogen. Lalu di bulan Maret, Korea Utara Kembali

menembakkan rudal balistik ke perairan Jepang dan pada bulan yang sama pula Korea Utara berhasil menguji kapal selamnya yang mempunyai tenaga untuk melakukan tembak rudal balistik (Joseph S. Bermudez, Jr, 1999).

Di tahun 2017, antara bulan Februari-Mei Korea Utara Kembali melakukan uji coba nuklirnya yang jauh ke laut Jepang, dan usaha ini diklaim untuk menegur pangkalan Amerika Serikat di Jepang. Bahkan pada 14 Mei, Korea Utara menguji coba rudal jarak jauh yang bernama Hwasong dimana rudal ini mempunyai jarak tempuh 700 Km sebelum mendarat di lautan Jepang. Lalu dua bulan kemudian, Korea Utara melakukan pengumuman bahwa mereka berhasil menciptakan rudal yang mampu mencapai Alaska dan ini diumumkan bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat.

Korea Utara melakukan tes uji coba nuklir yang terbesar pada 3 September, uji coba nuklir yang keenam ini berkekuatan 250 kiloton, atau bisa dibilang 16 kali lebih besar dari bom yang dimiliki Amerika Serikat yang menghancurkan Hiroshima pada 1945. Pada 15 September, Korea Utara Kembali menguji coba nuklirnya ke arah lautan Jepang meskipun saat itu mereka sedang menerima sanksi dari PBB. Ditambah lagi pada bulan November, Korea Utara meluncurkan rudal yang diberi nama Hwasong-15 ke arah daratan Amerika Serikat, yang mereka klaim memiliki hulu ledak yang luar biasa (Dwi Anggoro, 2018).

C. Six Party Talks

Amerika Serikat dan Korea Utara merundingkan Kerangka Kerja yang Disetujui tahun 1994 di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kegiatan nuklir Pyongyang, termasuk keputusan Korea Utara untuk menarik diri dari Perjanjian Nonproliferasi nuklir (NPT). Perjanjian itu menghentikan keputusan itu dan sebagai bagian dari

perjanjian itu, Korea Utara berjanji untuk membekukan program nuklirnya dengan imbalan bantuan energi, termasuk dua reaktor air ringan yang tahan proliferasi.

Kerangka yang Disetujui runtuh pada Oktober 2002 karena dugaan pelanggaran dari kedua belah pihak. Asisten Menteri Luar Negeri James Kelly mengklaim bahwa dalam pertemuan bilateral, Korea Utara telah mengakui memiliki program pengayaan uranium, yang dibantah Pyongyang, dan yang akan melanggar kesepakatan. Amerika Serikat lamban dalam memberikan bantuan energi yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Pembangunan reaktor air ringan masa depan jauh di belakang jadwal. Reaktor pertama pada awalnya dijadwalkan selesai pada tahun 2003 tetapi kemungkinan tidak akan beroperasi paling awal pada tahun 2008. Lihat Sekilas tentang Kerangka Kerja yang Disetujui AS-Korea Utara untuk informasi lebih lanjut. Pada Januari 2003, Korea Utara mengumumkan penarikannya dari Perjanjian Nonproliferasi nuklir (NPT). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kronologi Diplomasi Nuklir dan Rudal AS-Korea Utara (Stephan, 1982.).

Pada awal Agustus 2003, Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk menghadiri pembicaraan enam pihak yang akan diadakan di Beijing. Di antara periode kebuntuan dan krisis, pembicaraan enam pihak mencapai terobosan kritis pada tahun 2005, ketika Korea Utara berjanji untuk meninggalkan "semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada" dan kembali ke NPT, dan pada tahun 2007, ketika para pihak menyetujui serangkaian langkah untuk mengimplementasikan perjanjian 2005 itu. Sementara langkah-langkah tersebut tidak pernah sepenuhnya terwujud, dan Korea Utara tetap berada di luar NPT, Pyongyang menonaktifkan reaktor nuklir yang menghasilkan plutonium untuk program senjatanya.

Putaran pertama

Pembicaraan Putaran Pertama dimulai 27 Agustus 2003 di Beijing. Posisi awal Korea Utara menyerukan normalisasi hubungan dan pakta non-agresi dengan Amerika Serikat, tanpanya, Pyongyang menegaskan, pembongkaran program nuklirnya tidak akan mungkin dilakukan. Amerika Serikat sebelumnya telah menolak proposal pakta non-agresi awal musim panas itu dan tetap teguh pada poin itu selama pembicaraan; batu sandungan ini menghalangi kesepakatan substantif apa pun di Putaran Pertama. Pada pembicaraan hari kedua, delegasi Korea Utara, Wakil Menteri Luar Negeri Kim Yong Il menyatakan bahwa Korea Utara akan segera menguji senjata nuklir untuk membuktikan kemampuan tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri China Wang Yi menguraikan enam poin konsensus yang telah dicapai pada akhir putaran. Ini termasuk komitmen untuk bekerja untuk menyelesaikan masalah nuklir melalui cara damai dan dialog, mengejar semenanjung Korea yang bebas nuklir dengan tetap memperhatikan keamanan Korea Utara, dan menghindari tindakan yang akan memperburuk situasi lebih lanjut (kcna, 2003)..

Putaran Kedua

Sementara China menyerukan untuk kembali ke forum, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat bertemu secara terpisah untuk membahas strategi bersama untuk putaran berikutnya dan kemungkinan untuk sistem inspeksi yang dapat diverifikasi. Pada akhir Oktober 2003, China mendapatkan persetujuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Il untuk kembali ke perundingan enam pihak, setelah Presiden AS George W. Bush menyatakan keterbukaannya untuk memberikan jaminan keamanan informal tanpa pakta non-agresi atau perjanjian damai. . Amerika Serikat, bagaimanapun, masih tidak mengizinkan diplomatnya untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan

negosiator Korea Utara dan menuntut konsesi sepihak dari pihak Pyongyang. Tuntutan pusat AS adalah agar Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk "pembongkaran yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah" dari program nuklirnya, sebuah kebijakan yang kemudian dikenal sebagai CVID.

Perundingan Putaran Kedua dimulai 25 Februari 2004. Pada hari kedua pembicaraan, Kementerian Luar Negeri China dan negosiator utama Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Losiukov, keduanya melaporkan bahwa Korea Utara telah menawarkan untuk menghancurkan program senjata nuklirnya, tetapi akan tidak menghentikan kegiatan nuklir damai. Ini mewakili pembalikan sebagian dari penawaran Januari. Sementara China dan Rusia mendukung kesepakatan atas dasar baru ini, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan bersikeras agar Korea Utara menghapus semua fasilitas dan program nuklirnya. Pejabat AS percaya bahwa program nuklir sipil Korea Utara tidak praktis untuk penggunaan ekonomi dan kemungkinan besar digunakan untuk kegiatan lain. kertas Ketua yang akhirnya beredar pada akhir diskusi sebagai pengganti pernyataan bersama tidak termasuk perjanjian langkah awal, tetapi menegaskan kembali komitmen semua pihak untuk senjata nuklir bebas semenanjung Korea (Mofa, 2004)..

Putaran Ketiga

Pada tanggal 23 Juni 2004, enam negara bagian berkumpul kembali untuk memulai perundingan Putaran Ketiga. Harapan diredam oleh ketidakpastian yang dihasilkan oleh pemilihan Presiden di Amerika Serikat akhir tahun itu. Menjelang perundingan, Amerika Serikat mengedarkan proposal resmi pertamanya untuk pembongkaran program nuklir Korea Utara secara bertahap. (Lihat *ACT, Juli 2004.*) Proposal tersebut memberi Korea Utara periode persiapan tiga bulan untuk

membekukan program-programnya, dan juga meminta pengiriman laporan lengkap kegiatan. Korea Selatan mempresentasikan proposal serupa yang sebagian besar mengikuti permintaan dasar AS untuk CVID. Pada upacara pembukaan Putaran Ketiga, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye Gwan menegaskan kembali bahwa negaranya bersedia menerima program "pembekuan untuk kompensasi" yang akan menyebabkan pencabutan program senjata nuklirnya.

Sekali lagi kekurangan konsensus yang diperlukan untuk pernyataan bersama, sebagai gantinya pernyataan Ketua dikeluarkan. Selain menegaskan kembali komitmen yang telah dibuat sebelumnya, para pihak menekankan perlunya proses "kata demi kata" dan "tindakan untuk bertindak" menuju penyelesaian krisis.

Babak Keempat

Hampir setahun ketidakpastian membagi Putaran Ketiga dan Keempat dari pembicaraan enam pihak. Sebagian karena pemilihan Presiden di Amerika Serikat, yang berlangsung pada awal November 2004 dan menghasilkan masa jabatan kedua bagi George W. Bush. Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu pernyataan kembali kebijakan pemerintahan Bush kedua sebelum memutuskan apakah akan menghadiri putaran pembicaraan berikutnya.

Pada awal Februari 2005, Korea Utara menyatakan dirinya memiliki senjata nuklir dan mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan enam pihak di masa depan. Mereka menuduh Amerika Serikat berusaha menggulingkan pemerintahannya dan merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice dalam sidang konfirmasi bahwa Korea Utara adalah "pos terdepan tirani." Akhirnya, setelah pertemuan Juli 2005 di Beijing dengan pemimpin negosiator AS yang baru Christopher Hill, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye Gwan mengumumkan bahwa

negaranya akan bersedia untuk menghadiri putaran baru pembicaraan selama pekan tanggal 25 Juli 2005.

Salah satu bujukan yang menarik Korea Utara kembali ke meja perundingan adalah pengakuan AS terhadap Korea Utara sebagai negara berdaulat ditambah dengan pernyataan bahwa mereka tidak berniat untuk menginvasi Korea Utara. Ini diulangi pada hari pertama negosiasi. Pembicaraan yang dihasilkan jauh lebih lama dari putaran sebelumnya, berlangsung selama 13 hari penuh. Amerika Serikat melunakkan penentangannya terhadap program energi sipil Korea Utara, sementara pernyataan bersama berdasarkan kebangkitan Deklarasi Bersama Denuklirisasi Semenanjung Korea tahun 1992 yang melarang pengujian, produksi, dan penyebaran senjata nuklir dibahas. Amerika Serikat juga terlibat dalam diskusi bilateral yang panjang dengan delegasi Korea Utara, mencabut pembatasan sebelumnya yang melarang negosiator AS untuk melibatkan Korea Utara secara langsung.

Pada tanggal 19 September 2005, enam pihak mencapai terobosan pertama dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara, mengeluarkan pernyataan bersama tentang langkah-langkah yang disepakati menuju denuklirisasi Semenanjung Korea "secara bertahap sejalan dengan prinsip komitmen untuk komitmen, aksi untuk aksi."

Korea Utara berkomitmen untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan program yang ada, kembali ke NPT dan menerima inspeksi IAEA. Sebagai imbalannya, pihak lain mengungkapkan rasa hormat mereka atas pernyataan Korea Utara tentang hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan setuju untuk membahas penyediaan reaktor nuklir air ringan "pada waktu yang tepat". Amerika Serikat dan Korea Selatan sama-sama menegaskan bahwa mereka tidak akan mengerahkan senjata nuklir di semenanjung itu, dan menyatakan, bersama dengan Rusia, China, dan Jepang,

kesediaan mereka untuk memasok Korea Utara dengan bantuan energi. Amerika Serikat dan Jepang, selanjutnya, berkomitmen untuk berupaya menormalkan hubungan dengan Korea Utara.

Sehari setelah Pernyataan Bersama disepakati, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menyediakan reaktor air ringan "sedini mungkin". (Lihat *ACT*, November 2005.) Meskipun Pyongyang tampaknya mundur dari permintaan itu di hari-hari berikutnya, ketidaksepakatan mengenai waktu diskusi tentang penyediaan reaktor semacam itu tetap ada.

Putaran Kelima

Putaran pembicaraan berikutnya dimulai pada 9 November 2005 dan berlangsung selama tiga hari. Enam Pihak mengungkapkan pandangan mereka tentang bagaimana Pernyataan Bersama harus dilaksanakan, tetapi tidak ada pencapaian baru yang terdaftar dan negosiasi substansial tidak dicoba atau dibayangkan. Kepala negosiator AS Christopher Hill berkata, "Kami tidak berharap untuk membuat terobosan besar apa pun." Pertemuan tersebut diakhiri tanpa menetapkan tanggal untuk putaran pembicaraan berikutnya.

Setelah sesi pertama berakhir, iklim negosiasi memburuk secara signifikan. Sanksi AS terhadap entitas perdagangan Korea Utara serta Banco Delta Asia dari Makau memicu kecaman keras dari Pyongyang. Korea Utara memboikot pembicaraan enam pihak sekali lagi, dan melakukan beberapa uji coba rudal pada Juli dan uji coba nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006.

Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1718 pada 14 Oktober, yang mewajibkan Korea Utara untuk menahan diri dari pengujian nuklir atau

rudal lebih lanjut, meninggalkan program senjata pemusnah massal (WMD) dan misilnya, dan segera bergabung kembali dengan pembicaraan enam pihak.

Diskusi lebih lanjut dilanjutkan pada bulan Februari 2007 yang diakhiri dengan kesepakatan tentang langkah-langkah awal untuk mengimplementasikan Pernyataan Bersama 2005. Perjanjian 13 Februari menyerukan langkah-langkah yang akan diambil selama 60 hari ke depan di mana Korea Utara berkomitmen untuk menutup dan menyegel fasilitas nuklir Yongbyon dan untuk membahas daftar kegiatan terkait nuklirnya dengan pihak lain. Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen untuk terlibat dalam pembicaraan untuk menormalisasi hubungan, sementara semua pihak akan bekerja untuk menyediakan 50.000 ton bahan bakar minyak, semuanya dalam jangka waktu 60 hari. Amerika Serikat juga setuju untuk memulai proses menghapus Korea Utara dari daftar negara sponsor terorisme dan menghentikan penerapan Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh yang berkaitan dengan Korea Utara. Perjanjian tersebut menetapkan 19 Maret, Tanggal 2007 untuk perundingan Putaran Keenam dan menguraikan kerangka kerja tindak lanjut oleh enam pihak untuk melaksanakan Pernyataan Bersama September 2005.

Putaran Keenam

Putaran pembicaraan berikutnya dimulai tepat waktu tetapi tidak mencapai kesepakatan substantif dalam sesi awalnya setelah delegasi Korea Utara keluar karena penundaan pencairan dana dari Banco Delta Asia yang terkena sanksi. Para diplomat optimis bahwa masalah seputar bank telah diselesaikan untuk sementara, tetapi penundaan teknis dalam pengiriman dana menyebabkan pengumuman penundaan lagi.

IAEA mengkonfirmasi pada Juli 2007 bahwa reaktor nuklir Yongbyon 5 megawatt telah ditutup dan ditutup. Ketika pembicaraan dilanjutkan pada September-

Oktober 2007, rencana implementasi tahap kedua disepakati yang menyerukan pelumpuhan tiga fasilitas nuklir utama di kompleks Yongbyon dan penyediaan daftar kegiatan nuklir Korea Utara, keduanya pada akhir tahun. . Korea Utara selanjutnya berkomitmen untuk tidak mentransfer bahan, teknologi, atau pengetahuan nuklir kepada pihak lain. Pihak lain sepakat untuk meningkatkan bantuan kepada Korea Utara menjadi total 1 juta ton bahan bakar minyak berat atau setara bahan bakar minyak dan kelanjutan proses normalisasi diplomatik.

Menyusul banyak penundaan dalam implementasi, negosiator AS dan Korea Utara bertemu di Singapura pada bulan April 2008 dan menyetujui tiga langkah yang akan digunakan Korea Utara untuk merinci atau menangani aktivitas nuklirnya: deklarasi yang diberikan oleh Korea Utara mengenai program plutoniumnya, publikasi AS "RUU khusus" yang merinci kecurigaan Washington terhadap program pengayaan uranium Korea Utara dan proliferasi nuklir Pyongyang ke negara lain, dan pemahaman Korea Utara tentang kekhawatiran AS. (Lihat *ACT Juni 2008*).

Pembicaraan enam pihak lebih lanjut berlanjut pada Juni 2008, diakhiri dengan pengiriman deklarasi kegiatan nuklir Korea Utara. Pada saat yang sama, Presiden AS Bush mengumumkan bahwa dia telah menghapus Korea Utara dari Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh dan telah memberi tahu Kongres tentang penghapusan negara itu dari daftar negara sponsor terorisme.

Kesulitan menyepakati sistem verifikasi menunda aksi kedua hingga 11 Oktober 2008. Perlunya sistem verifikasi ditegaskan kembali dalam komunike bersama 12 Juli yang dikeluarkan oleh enam pihak. Proposal 11 Agustus 2008 dari Amerika Serikat untuk mengizinkan inspeksi verifikasi di lokasi di seluruh Korea Utara ditolak dengan tegas. Bersikukuh bahwa inspeksi dibatasi ke Yongbyon, Korea

Utara mengumumkan bahwa mereka membatalkan tindakan penonaktifan dan mengatakan akan memulai kembali pabrik pemrosesan ulangnya. Perjanjian lisan dibuat setelah Hill mengunjungi Pyongyang pada awal Oktober. Perjanjian tersebut memungkinkan untuk inspeksi di luar Yongbyon ketika China, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat menyetujui melalui konsensus.

Kemajuan lagi kandas pada November ketika Korea Utara membantah telah melakukan perjanjian lisan untuk mengizinkan pengumpulan sampel di Yongbyon. Sesi lain dari pembicaraan enam pihak pada bulan Desember tidak menghasilkan konsensus baru. Korea Utara menyatakan bahwa jika pengambilan sampel dilakukan, itu tidak akan dilakukan selama tahap kedua.

Pada tanggal 5 April 2009, setelah peringatan berulang kali dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, Pyongyang menguji coba roket tiga tahap Taepo Dong-2 yang dimodifikasi, yang seolah-olah sebagai bagian dari program luar angkasa sipilnya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan presiden 13 April yang menyebut tes itu melanggar Resolusi 1718, dan memperluas sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Korea Utara tak lama kemudian. Korea Utara menanggapi pada 14 April, menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam pembicaraan enam pihak dan tidak lagi terikat oleh kesepakatan sebelumnya yang dicapai dalam diskusi tersebut.

Sejak putaran terakhir pembicaraan, masing-masing pihak yang terlibat terkadang menyerukan dimulainya kembali. Pada bulan Desember 2010, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat menyerukan sesi darurat dari pembicaraan enam pihak. Pada tahun 2014, seorang utusan khusus Korea Utara mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Korea Utara akan siap untuk melanjutkan pembicaraan enam pihak. China terus meminta dari dimulainya kembali, hingga

Agustus 2017 . Namun, ada sedikit kemajuan untuk melanjutkan pembicaraan enam pihak baru-baru ini.

D. Pencapaian Six Party Talks

Pertama, pembicaraan telah menetapkan tujuan untuk mendirikan Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir, Demokratik Rakyat Korea (DPRK) secara eksplisit menyatakan niatnya untuk meninggalkan program nuklir dan menetapkan pembekuan program nuklir sebagai langkah awal

Kedua, mekanisme Six Party Talks dilembagakan, di mana masalah akan diselesaikan dengan dialog damai, kelompok kerja diluncurkan dan masalah substansial didiskusikan, yang akan terus memperdalam proses pembicaraan damai.

Ketiga, Six Party Talks telah menetapkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah nuklir dengan semua pihak setuju untuk mengambil "langkah-langkah terkoordinasi" untuk menangani masalah nuklir dan kekhawatiran terkait dengan cara "komitmen lisan" dan "tindakan untuk bertindak",

Atas dasar pernyataan Korea Utara bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai, Pyongyang mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat untuk menyediakan reaktor air ringan. Namun, permintaan Korut malah memicu perdebatan karena Amerika Serikat menilai Korut tidak boleh mendapatkan reaktor nuklir jenis apa pun. Pihak lain menghormati keinginan Korea Utara dan berjanji untuk membahasnya lagi di kemudian hari. Beberapa kali Korut telah menyatakan akan segera membongkar fasilitas nuklirnya, namun ternyata pembongkaran tersebut tidak dapat dilaksanakan secara nyata dan hanya menjadi persoalan.

Terlepas dari kenyataan bahwa Korea Utara telah menyetujui kesepakatan yang dibuat dalam forum Six Party Talks. IAEA melaporkan bahwa Korea Utara telah menutup fasilitas nuklirnya pada Juni 2007. Namun, sebenarnya semua ini hanya sementara, karena buktinya Korea Utara telah mengaktifkan kembali program pengembangan nuklirnya setelah kesepakatan menemui jalan buntu. Tujuan Pembicaraan Enam Pihak untuk denuklirisasi Korea Utara belum terwujud karena banyaknya konflik internal yang terjadi antara anggota Pembicaraan Enam Pihak (Koen dan Jan Melissen. 2008).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep National Interest menurut Donald E. Nuechterlein yang menjelaskan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain tentunya dipengaruhi oleh banyak seperti faktor pertahanan, ekonomi, ketertiban dunia, dan ideologis. Sikap China yang bersifat ambivalen terhadap Korea Utara dikarenakan China didorong oleh beberapa faktor kepentingan.

A. Kepentingan China terhadap Korea Utara

Penulis kemudian melihat bahwa upaya Reunifikasi Korea yang salah satu isinya adalah denuklirisasi sangat dipengaruhi dan sangat bergantung pada China, sejauh mana China berkomitmen untuk turut menerapkan sanksi yang diberlakukan PBB kepada Korea Utara akan berpengaruh pada jalannya program nuklir Korea Utara. Kebijakan dan perilaku China terhadap Korea Utara yang tidak konsisten dan cenderung bersifat ambivalen, penulis kemudian melihat China memiliki kepentingan didalam proses Reunifikasi Korea ini, dengan menggunakan konsep National Interest menurut Donald E. Neucterlein yang mengatakan bahwa kepentingan nasional sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ketertiban dunia, dan kepentingan ideologi. Penulis kemudian memaparkan kepentingan China yang berpengaruh Reunifikasi Korea dari keempat faktor-faktor tersebut.

1. Kepentingan Pertahanan

Menurut *Donald E Nuechterlein*, Kepentingan Pertahanan adalah perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan / atau ancaman yang diilhami dari luar terhadap sistem pemerintahannya. Kebijakan dan perilaku China yang tidak konsisten dan cenderung

bersifat ambivalen, penulis kemudian melihat hal ini juga dipengaruhi faktor kepentingan pertahanan China yang bisa terancam jika tidak menekan Korea Utara melakukan denuklirisasi. Korea Utara yang terus mengembangkan nuklirnya membuat Amerika Serikat mengarahkan sistem pertahanan rudal berbasis darat atau Terminal High Attitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan.

THAAD merupakan ancaman bagi pertahanan China, karena THAAD berhubungan dengan rudal balistik China yang sebenarnya ditunjukkan untuk Amerika Serikat. Adanya sistem pertahanan rudal berbasis darat di Korsel dapat menguntungkan Amerika Serikat untuk melacak keberadaan rudal balistik milik China dan hal ini yang kemudian menjadi ancaman bagi China karena bisa mengganggu pertahanan negaranya. Pasalnya THAAD ini mempunyai kapasitas radar dari AN/TPY-2 dengan X-bandnya yang menjadi salah satu alasan penentangan tersebut. Dengan estimasi jarak hingga 3000km, radar ini sudah dengan sangat mudah dapat melacak persenjataan Tiongkok secara langsung walaupun tidak secara keseluruhan, oleh sebab itulah THAAD ini menjadi ancaman bagi Tiongkok karena dapat mengancam keamanan nasional negaranya. (Salidjanova, 2017).

Selain karena hal tersebut, pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara juga akan mengancam kestabilan keamanan China setelah pernyataan Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB mengatakan “*The US has great strength and patience, If it is forced to defend ourselves or our allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea*” (Specia, 2017). Ancaman Amerika Serikat untuk menghancurkan Korea Utara sangat berbahaya bagi China karena jika Korea Utara hancur, China akan menerima jutaan pengungsi dari Korea Utara yang akan memasuki China sehingga dapat membuat ketidakstabilan keamanan di China (Albert, 2018). Pengungsi yang datang ke China hingga tahun 2019 mencapai kurang lebih 300 ribu

orang yang akan membuat China menanggung dari adanya potensi migrasi pengungsi dari Korea Utara dikarenakan, jumlah penduduk di China sendiri sudah begitu besar dan tidak memungkinkan untuk menerima atau menampung pengungsi.

Namun, kepentingan pertahanan China akan bertabrakan dengan kepentingan Korea Utara dalam membangun nuklir dan usaha Korea Utara selama ini dalam membangun nuklir yang dimulai [asca perang Korea, Korea Utara memulai program nuklir pada tahun 1956 dengan mengirimkan para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moscow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain (Uk Heo dan Jung-Yeop Wo, 2008). Dikarenakan teknologi yang dimiliki Korea Utara tidak cukup maju sehingga mereka tidak mampu untuk memproduksi senjata nuklir tanpa bantuan dari negara-negara lain. Tahun 1965, para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal yang ditandai dengan pendirian Akademi Militer Hamhung (Joseph S. Bermudez, 1999) , Uni Soviet yang melihat Korea Utara yang serius dalam pengembangan nuklir membuatnya memberikan bantuan yang meluas kepada Korea Utara dan mendirikan pusat penelitian di Yongbyon, Korea Utara.

Yongbyon menjadi tempat Uni Soviet untuk membantu Korea Utara menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW dan reactor tersebut yang akan memproduksi plutonium yang cukup dan menjadi sebuah bom nuklir, dengan berdirinya fasilitas nuklir di Yongbyon, Korea Utara akhirnya memperoleh plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir. Korea Utara yang sadar akan lemahnya militer konvensional mereka sehingga pengembangan program nuklir menjadi alat yang paling penting dalam menunjang kepentingan nasionalnya yaitu (Alexander, 1995) ;

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan, Korea Selatan yang saat itu didukung militer Amerika Serikat membuat Korea Utara memilih melakukan pengembangan nuklir agar mempunyai power yang sama dengan Korea Selatan.
2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar negara di dunia, pengembangan nuklir Korea Utara juga bertujuan untuk menjadikan nuklirnya sebagai alat diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya di komunitas internasional.
3. Digunakan sebagai sarana pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan, pengembangan nuklir Korea Utara diharapkan bisa membuat negaranya lebih kuat dibandingkan Korea Selatan.
4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan, Korea Selatan yang mendapatkan senjata dari Amerika Serikat membuat Korea Utara mencari senjata yang seimbang dengan senjata canggih milik Korea Selatan dan memilih nuklir sebagai senjata tandingan yang di punya oleh Korea Selatan.

Jika China, memaksakan kepentingannya untuk terus menerus menekan Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi, maka kedua negara baik Korea Utara dan China akan mengklaim satu sama lain bahwa ada upaya untuk saling melemahkan kepentingan negaranya masing-masing dan saling membawa ancaman bagi kedaulatan negara.

2. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan Ekonomi adalah peningkatan ekonomi negara-bangsa dan kesejahteraan dalam hubungan dengan negara bagian lain. Dalam upaya mendukung denuklirisasi, China kemudian mendukung resolusi DK PBB 2270 yang mengatur pelarangan perdagangan sumber daya mineral dari dan/atau ke Korea Utara (Ruhmiyati

dan Indrawati, 2018), hal ini dilakukan agar Korea Utara mengalami instabilitas ekonomi sehingga akan menghentikan program nuklirnya yang membutuhkan biaya yang besar dan akan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Namun, di tahun yang sama yaitu pada tahun 2016 setelah China menyetujui dan mendukung resolusi DK PBB 2270, China kemudian melanggar resolusi tersebut setelah melakukan ekspor batubara senilai satu juta dollar US ke Korea Utara dengan alasan sebagai bantuan kepada masyarakat Korea Utara. Melihat akan hal itu, penulis menganggap bahwa hal itu dilakukan China agar rezim pemerintahan Korea Utara tidak runtuh akibat krisis yang akan dialami negaranya karena sanksi PBB.

Bahkan China membantu Korea Utara untuk menghadapi sanksi PBB, dilansir dari *Mainichi.jp*, 20 Desember 2018, Cina telah menyediakan teknologi dan ahli kepada Korea Utara untuk konversi batu bara ke gas. Kebutuhan Korea Utara terhadap minyak sangatlah tinggi, dikarenakan kurangnya sumber minyak dalam negeri Korea Utara membuatnya sepenuhnya bergantung pada impor. Cina, yang menyalurkan minyak mentah melalui Sungai Yalu, berhenti mengekspor minyaknya ke Korea Utara dalam data ekonomi setelah sanksi PBB. China kemudian mencari jalan lain agar membantu Korea Utara dan dilaporkan salah satu perusahaan Cina memasok banyak alat konversi batu bara yang bisa mengubah 40 ribu meter kubik batu bara dalam waktu satu jam untuk satu kawasan industri di Pyongyang. Menurut para ahli, yang dikutip dari laporan *Mainichi.jp*, dari hasil konversi batu bara Korut ini bisa menghasilkan cukup bahan bakar gas sintetis yang setara dengan 10 persen impor minyak tahunan Korea Utara.

Hubungan kerja sama perdagangan Korea Utara dengan China tidak bisa begitu saja terputus. Ada kepentingan Cina di Korea Utara yang sangat penting. China bahkan disebut-sebut sedang gencar-gencarnya mencari keuntungan ekonomi dari Korea Utara. Upaya peningkatan manfaat ekonomi tersebut terlihat dari pemanfaatan pelabuhan di

Korea Utara sebagai basis transportasi logistik China. Proyek Changjitu yang bertumpu pada tiga lokasi utama di wilayah Timur Laut Tiongkok, yaitu Kota Changchun, Kota Jilin, dan wilayah sungai Tumen, merupakan kawasan strategis perdagangan Tiongkok. Wilayah Cina Timur Laut merupakan daerah yang kaya akan bahan mentah seperti gas alam, minyak mentah, bahan tambang, hasil laut dan hasil kehutanan (Ho Lee dan Kang 2011, 6).

Untuk alasan ini, China perlu mendistribusikan sumber daya alam di wilayah Timur Lautnya melalui koneksi pelabuhan Korea Utara. Dengan menggunakan pelabuhan Korea Utara, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang dari China ke Jepang bisa ditempuh dalam satu hari. Sedangkan waktu tempuh sebelumnya bisa mencapai dua belas hari. Tidak hanya untuk pendistribusian perdagangannya ke Jepang, China juga memiliki target untuk menghubungkan beberapa negara di sekitarnya seperti Korea Selatan, Rusia, Korea Utara dan Mongolia serta keinginan China untuk membuat jalur transportasi darat lintas Sino-Mongolia. serta menghubungkan Asia Timur, Eropa dan Amerika.

3. Kepentingan Ketertiban Dunia

Kepentingan untuk tatanan dunia adalah pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa mungkin merasa aman, dan di mana warga negara dan perdagangan dapat beroperasi dengan damai di luar perbatasan mereka. Latar belakangnya adalah transformasi identitas Tiongkok sebagai Kekuatan Besar. Dalam upayanya untuk menjadi negara Kekuatan Besar atau Great Power, Xi Jinping telah mengumumkan konsep Impian China, yang digunakan untuk mendorong aktivitas kebijakan luar negerinya dan sebagai korespondensi dengan statusnya sebagai Kekuatan Besar di dunia internasional. Dalam Chinese Dream terdapat empat kunci utama yaitu Friendship, Sincerity, Reciprocity, dan Inclusiveness. Bangkitnya Cina

menjadi salah satu Kekuatan Besar adalah dengan mengemban tanggung jawab dan tugas internasional di tingkat global. Masalah nuklir Korea Utara merupakan salah satu isu sensitif keamanan di tingkat internasional. Sebab China tidak dapat mendukung tindakan Korea Utara yang mengancam keamanan dan keamanan internasional. Jika China tidak mengutuk aksi nuklir Korea Utara, maka kepercayaan internasional terhadap China akan melemah dan akan memperburuk citra China.

Nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi komunitas Internasional khususnya Kawasan regional Asia Timur. Beberapa negara yang dekat dengan Korea Utara khawatir dengan ancaman nuklir Korea Utara yang sewaktu-waktu dapat meluncur ke negaranya. Hal ini sangat wajar dikarenakan ada empat faktor yang membuat nuklir Korea Utara menjadi ancaman bagi dunia internasional;

Pertama, jangkauan rudal Korea Utara yang pada tahun 1998 Korea Utara sudah meluncurkan rudal Taepodong-1 yang mempunyai jarak tempuh 2.500 Km yang mereka uji coba melintasi wilayah udara Jepang. Lalu kemudian Kembali menguji coba nuklir yang memiliki daya tempuh 6.700 Km yang diberi nama Taepodong-2 pada tahun 2006. Bahkan, Korea Utara sudah mengklaim bahwa memiliki rudal balistik antarbenua (ICBM) yang secara akurat bisa sampai ke daratan Amerika Serikat.

Kedua, bukan hanya menguji nuklir, Korea Utara juga saat ini sedang mengembangkan bom hydrogen dan menguji cobanya pada 6 januari 2016 meskipun hanya berskala kecil. Bom hydrogen milik Korea Utara, mereka klaim memiliki daya ledak 50 megaton atau setara dengan 20 kali lipat dari bom Hiroshima di Jepang. Dan ini menandakan bahwa Korea Utara menjadi ancaman yang sangat luar biasa khususnya buat Amerika Serikat

Ketiga, ledakan nuklir Korea Utara diprediksi bisa menewaskan 2,1 juta orang di Korea Selatan maupun Jepang dengan sekali menembakkan bom nuklir kearah kedua negara tersebut. Sehingga hal ini yang membuat memicu reaksi Amerika Serikat untuk melihat Korea Utara sebagai musuh besarnya dan dampaknya akan berimbas kepada dua negara sekutu Amerika Serikat yaitu Jepang dan Korea Selatan menjadi target sasaran nuklir Korea Utara

Keempat, Pada September 2017, Korea Utara pernah meluncurkan rudal hydrogen dengan jarak tempuh sejauh 3.700 Km dan ketinggian 770 Km. Rudal milik Korea Utara tersebut mendarat tepat di Samudera Pasifik yang jauhnya sekitar 2.000 Km dari pulau Hokkaido. Peluncuran rudal tersebut memicu system peringatan darurat Jepang berbunyi dan menghimbau kepada masyarakat agar berlindung dalam rumah serta menyuruh masyarakat agar menjauhi tempat yang kemungkinan akan dijatuhi rudal.

Hal ini yang kemudian jadi perhitungan bagi China untuk ikut serta mendukung menekan Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi karena dari keempat faktor diatas, penulis juga menambahkan akan adanya *Bandwagon Effect* atau negara yang kemudian ikut-ikutan dalam pengembangan nuklir dikarenakan mau menandingi nuklir dari Korea Utara sehingga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea semakin memanas.

4. Kepentingan Ideologi

Pentingnya ideologi adalah perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai yang dipegang dan diyakini oleh orang-orang dari negara-bangsa yang baik secara universal. Korut yang tetap mengembangkan program nuklirnya, hal ini mengancam keamanan internasional dan juga akan berdampak balik pada rejim Korut yang akan disoroti oleh dunia internasional yang ingin menggulingkan rejim Korut yang

mengancam keamanan internasional karena terus berlanjut. mengembangkan program nuklirnya. Runtuhnya Korea Utara akan membuat komunitas internasional ragu-ragu atas sistem sosialis yang dianut kedua negara. Melalui kesamaan pandangan atau ideologi, yaitu sistem sosialis, China menginginkan Korea Utara menjadi bagian dari komunitas internasional, dengan mengubah sikapnya menjadi seperti China. China ingin Korea Utara diterima secara internasional, tetapi tetap memiliki wajah yang sama sebagai negara sosialis. Jika Korea Utara runtuh, kemungkinan yang akan terjadi adalah pergeseran ideologi sosialis menjadi demokratis.

Saat ini, hanya ada 5 negara yang menganut paham komunis dan khusus di Asia Timur hanya ada dua yaitu China dan Korea Utara, menurut Scobell “makin banyak rezim komunis terguling berarti makin sulit pula bagi yang masih ada untuk mengukuhkan legitimasinya”. Jika Korea Utara menghentikan program nuklirnya maka besar peluang untuk reunifikasi Korea terwujud yang akan berpengaruh pada pengaruh negara lain selain China yang akan masuk ke Korea utara dan akan mempengaruhi rezim dan ideologi. Di Kawasan Asia Timur, pengaruh Amerika Serikat menjadi lebih dominan dan akan mengancam pengaruh dan peran China di Kawasan Asia Timur.

Kekhawatiran China terhadap pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur memang sangat wajar dikarenakan Amerika Serikat menjadikan Kawasan Asia Timur sebagai kawasan strategis untuk menancapkan pengaruhnya. Terbukti saat perang Korea pada tahun 1950-1953 setelah Korea Utara memutuskan menyerang Korea Selatan. Kekuatan Korea Utara pada saat itu lebih unggul dari Korea Selatan dikarenakan mendapatkan dukungan dari China dan Uni Soviet, dimana China mengirim bantuan pasukan militer dan Uni Soviet mengirim alat-alat perang untuk Korea Utara (Millett, 2007). Korea Selatan yang merasa tidak diuntungkan dengan bantuan yang diterima Korea Utara dari China dan Uni Soviet, membuat Korea Selatan

memutuskan untuk meminta bantuan militer dari Amerika Serikat, sehingga membuat Amerika Serikat memutuskan untuk membantu Korea Selatan.

Melalui kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat memutuskan untuk meminta negara-negara anggota PBB memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan (Millet, 2007). Bantuan Amerika Serikat kepada Korea Selatan dan campur tangan dalam perang Korea dinilai bukan tanpa kepentingan nasional. Amerika memiliki kepentingan di Korea di berbagai bidang seperti:

1. Menjaga kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara adidaya;
2. Untuk mencegah munculnya pro-Soviet di mana Amerika Serikat khawatir bahwa semakin banyak negara akan bersekutu dengan Uni Soviet jika Korea Utara berhasil menginvasi Korea Selatan;
3. Adanya politik dalam negeri yaitu tahun 1950 merupakan tahun yang buruk bagi Amerika Serikat karena terdapat negara-negara Asia yang menganut Komunisme (American Foreign Policy, 2020).

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat ketakutan awal Amerika Serikat akan adanya *bandwagon effect* atau efek ikut-ikutan negara-negara lain untuk mendukung soviet dengan ideologi komunisnya dan saat ini itu yang terjadi pada China, pengaruh yang besar Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur akan membawa ketakutan kepada China sehingga Korea Utara menjadi negara tujuan China untuk menancapkan pengaruhnya dan mempertahankan rezim ideologi komunis di Korea Utara.

Dari keempat faktor diatas, kita dapat melihat kebijakan yang diambil China cenderung ambivalen terhadap Korea Utara dikarenakan China dilema terhadap semua kebijakan yang selama ini diambil untuk Korea Utara yang akan berpengaruh pada Reunifikasi Korea. Jika, China menyetujui denuklirisasi maka langkah yang seharusnya

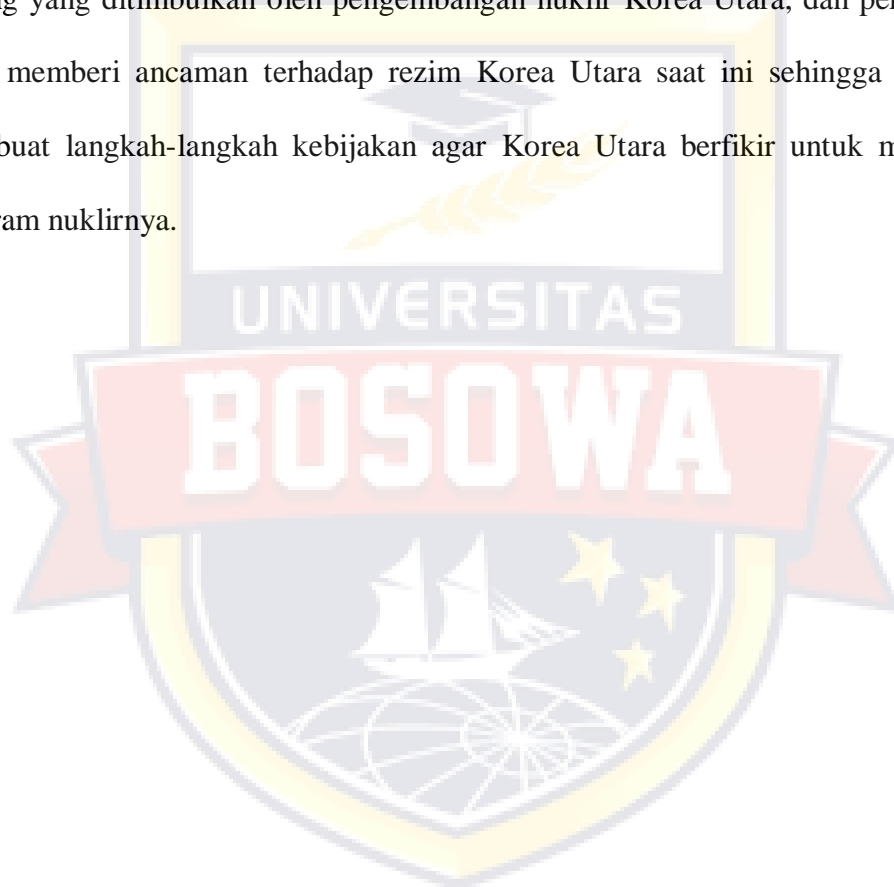
diambil oleh China adalah menutup kesempatan Korea Utara untuk mendapatkan pendapatan ekonomi dan sumber daya. Namun, hal itu akan berdampak juga pada China dikarenakan, China juga banyak mengambil keuntungan terhadap Korea Utara dengan menjadikan Korea Utara sebagai salah satu pusat jalur perdagangannya khususnya di Asia Timur.

Namun, jika China konsisten dengan mendukung dan menerapkan sanksi PBB kepada Korea Utara, itu akan membuat rezim Korea Utara bisa runtuh sehingga akan mempengaruhi dunia dalam melihat ideologi komunis dan semakin mengurangi eksistensi komunis di komunitas internasional khususnya di kawasan Asia Timur. Konsisten China pada pemberian sanksi kepada Korea Utara juga akan berdampak pada terwujudnya denuklirisasi yang akan mendukung proses Reunifikasi Korea dikarenakan stabilitas keamanan di semenanjung Korea tidak lagi memanas karena berhentinya Korea Utara mengembangkan nuklir.

Dari kepentingan diatas, kita dapat melihat sikap China yang bersifat ambivalen terhadap Korea Utara. Dan hal tersebut berkaitan dengan kepentingan yang bersifat vital dan non-vital. Kita tahu bahwa kepentingan vital adalah kepentingan yang berhubungan dengan ekonomi dan identitas suatu negara, China melihat Korea Utara sebagai negara yang mampu mendorong kepentingan vitalnya seperti memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Korea Utara sebagai tempat distribusi barang ke Jepang yang akan menghemat anggaran dan akan memakan waktu jauh lebih sedikit jika dibandingkan harus memakai pelabuhan China sendiri. Korea Utara juga yang merupakan negara yang masih menganut paham komunis sehingga membuat China merasa bahwa Korea Utara memiliki identitas yang sama dengannya. Karena rasa identitas yang sama pula membuat China tidak ingin adanya reunifikasi Korea karena akan mengancam hilangnya pengaruh China di Korea Utara. Hal inilah yang kemudian

membuat China masih bersifat ambivalen terhadap Korea Utara terkhusus dalam proses denuklirisasi karena ada hal kepentingan vital China sehingga melihat Korea Utara bukan sebagai musuh melainkan aliansi

Sedangkan dalam hal kepentingan non-vital, China melihat Korea Utara sebagai ancaman besar dikarenakan pengembangan nuklirnya yang akan menciptakan permusuhan dan ancaman bagi perdamaian dunia. Ketakutan China akan munculnya perang yang ditimbulkan oleh pengembangan nuklir Korea Utara, dan perang tersebut akan memberi ancaman terhadap rezim Korea Utara saat ini sehingga China harus membuat langkah-langkah kebijakan agar Korea Utara berfikir untuk menghentikan program nuklirnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu poin penting dalam reunifikasi Korea adalah denuklirisasi sehingga proses reunifikasi ini sangat bergantung pada pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, karena salah satu poin dari Reunifikasi Korea adalah terwujudnya denuklirisasi sehingga situasi di Semenanjung Korea bisa kondusif dan aman. China menjadi negara yang paling mampu menekan Korea Utara dalam pengembangan nuklir dengan menutup peluang sumber pendapatan yang diperoleh Korea Utara dari negara China yang menjadi partner dagang utama Korea Utara sehingga akan membuat Korea Utara kesulitan untuk mendapatkan dana dalam pengembangan nuklirnya yang membutuhkan dana yang besar.

Namun, China hingga saat ini masih bersifat ambivalen terhadap Korea Utara dikarenakan China mempunyai kepentingan nasional disana, sehingga hal tersebut yang mempengaruhi proses Reunifikasi Korea dimana China tidak konsisten dengan sanksi yang diberikan oleh PBB terhadap Korea Utara untuk memberikan ruang yang sempit untuk mendapatkan pendapatan dalam pengembangan nuklirnya. Sikap ambivalen China terhadap Korea Utara tentunya dikarenakan kepentingan nasional yang terdiri dari beberapa faktor seperti

- **Kepentingan Perawatan**

Kepentingan Pertahanan dan Keamanan China terancam oleh **Terminal High Attitude Area Defense (THAAD) atau semacam alat pelacak keberadaan rudal**. Jangkauan alat ini mencapai 3000km yang memungkinkan untuk juga menjangkau persenjataan Tiongkok seperti rudal balistiknya. Ditambah lagi China terancam oleh membludaknya pengungsi dari Korea Utara karena hingga 2019 kurang lebih 300 ribu

pengungsi korut masuk ke China, nah dari jumlah penduduk China yang juga sangat banyak tidak memungkinkan lagi untuk menerima pengungsi dari negara Korut. Isu ini semakin memanas setelah pernyataan Trump dalam pidato majelis umum PBB yang mengancam akan menghancurkan Korea Utara. Kedua hal tersebut merupakan akibat yang diterima oleh China dari sikap Korea Utara yang tetap melanjutkan program nuklirnya

- **Kepentingan Ekonomi**

China banyak mencari keuntungan ekonomi dari Korea Utara, ini merupakan bagian dari rencana besar China yaitu menghubungkan jalur transportasi yang menghubungkan beberapa wilayah dan wilayah tersebut salah satunya adalah Korea Utara dimana proyek ini dinamakan **Changjitu Project** sebagai jalur perdagangan yang menggunakan Pelabuhan-Pelabuhan Korea Utara sebagai basis transportasi logistic menuju Jepang.

Jadi *Changjitu Project* itu berasal dari nama kotanya yaitu Changchun, Jilin, dan sungai Tumen dimana disitu kaya akan raw materials seperti gas alam, crude oil, bahan tambang, hasil laut, dan hasil kehutanan yang siap untuk diolah dan dikirim melalui Pelabuhan Korea Utara ke Jepang. Dengan menggunakan Pelabuhan Korea Utara, China hanya membutuhkan waktu selama satu hari yang sebelumnya harus membutuhkan waktu 12 hari.

- **Kepentingan Ketertiban Dunia**

China harus melakukan pemeliharaan politik internasional dengan mendukung denuklirisasi. Dilatarbelakangi oleh Konsep *Chinese Dream*, sehingga China harus menolak denuklirisasi karena mengancam keamanan internasional dan supaya menjaga citra China di dunia internasional.

- **Kepentingan Ideologi**

Saat ini, hanya ada 5 negara yang menganut paham komunis dan khusus di Asia Timur hanya ada dua yaitu China dan Korea Utara, menurut Scobell “makin banyak rezim komunis terguling berarti makin sulit pula bagi yang masih ada untuk mengukuhkan legitimasinya” . Jika Korea Utara menghentikan program nuklirnya maka besar peluang untuk reunifikasi Korea terwujud yang akan berpengaruh pada pengaruh negara lain selain China yang akan masuk ke Korea utara dan akan mempengaruhi rezim dan ideologi.

Namun, Jika China tidak menekan Korea Utara maka Korea Utara akan terancam oleh sanksi PBB dan ancaman serangan dari luar seperti serangan dari Amerika Serikat yang akan membuat rezim Korea Utara dengan komunisnya akan hancur. Disini penulis melihat China semakin dilema terhadap sikap apa yang tepat untuk diberlakukan kepada Korea Utara sehingga sikap China disini cenderung bersifat ambivalen.

Dari keempat faktor diatas, kesimpulan saya sebagai penulis adalah China ingin denuklirisasi namun tidak untuk reunifikasi dikarenakan banyaknya kepentingan China atas Korea Utara sehingga hal tersebut yang berdampak pada proses reunifikasi Korea yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk terwujud.

B. Saran

Saran saya sebagai penulis, untuk mewujudkan Reunifikasi Korea, itu hanya bisa dilakukan jika hanya kedua negara Korea yaitu Korea Selatan dan Korea Utara yang saling berdiskusi terkait Semenanjung Korea tanpa adanya intervensi atau kepentingan dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- American Foreign Policy: Cold War Origins And U.S. Intervention In The Korean War.* (2010). Retrieved 2017, from MIT OpenCourseWare: <http://ocw.mit.edu/terms>
- Asnaeni, Nur Afiah. 2017 “ *Dampak Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015*” (Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017)
- Byung-joon , “*Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur,*” Masalah Keamanan Asia, (CSIS, 1990),
- Cahyo, Agus N., 2012, *Perang-Perang Paling Fenomenal, Dari Klasik Sampai Modern*, Yogyakarta: Bukubiru
- Christophorus Richard, Soekotjo Hardiwinoto, dan Muchsin, 2016 “*Tanggung Jawab Dewan PBB Dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara dan Implikasi Terhadap Masyarakat Internasional*” volume 5, Nomor 2, tahun 2016
- De Ceuster, Koen dan Jan Melissen. 2008. *Ending The North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspective.* Den Hag: Desiree Davidse.
- Denney, Steven. 2015, *South Korea’s Economic Dependence on China*, dalam <http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/> diakses pada tanggal 15 Januari 2021
- Etel Solingen, *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*, (Princeton: Princeton University Press, 2007)
- Hafidz, Henry . “*Sejarah Perang Korea Utara dan Korea Selatan (1950 – 1953)*”, 2018 , diakses melalui <https://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-perang-korea> pada tanggal 2 Januari 2021
- Hyu, J, *Fakta-fakta Tentang Korea.* (Seoul: Pelayanan Kebudayaan dan Informasi Korea, 2008)
- I.G.N Dwi Putra Justisiawan “*Six Party Talks dalam negosiasi Amerika Serikat dan Korea Utara Terkait Daftar Hitam Negara-Negara Pendukung Terorisme Tahun 2003-2008*” (Jurnal, Universitas Udayana, 2014).
- Jang, H. J. (2010). *Overview of the Korean War and its Legacy.* Retrieved 2017, from Stanford SPICE Freeman Spongli Institute for International Studies : http://spice.fsi.stanford.edu/docs/overview_of_the_korean_war_and_its_legacy

- Jemadu , Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta:Graha Ilmu,).
- Joseph S. Bermudez, Jr., “*A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*,” Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999)
- Kathryn Weathersby, “*Soviet Aims in Korea and The Origins of The Korean War, 1945-1950: New Evidence From Russian Archives*”, Woodrow Wilson International Center For Scholars, Working Paper No. 8, 1993
- Krasner, Stephan D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. Cornell University Pres.
- Kuhn, Jessica. 2010 “*Global Security Issues in North Korea*” Multilateralism in Northeast Asia, (Task Force, 2010)
- Major *Facts About Six Party Talks*,
 “<http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/6636560.html>” Diakses pada 5 Januari 2021
- Mansourouf, Alexander Y . “The Origins, Evolution and Future of The North Korean Nuclear Program”, dalam *Korea and World Affairs*, Vol. XIX No. 1, Spring 1995
- Mardiasih, Riska. 2010 “*Respon Negara-Negara Asia Timur Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.
- Meick, Ethan dan Nargiza Salidjanova, 2017. “*China’s Response to U.S-South Korean Missile Defense System Deployment and Implications*” U.S.-China Economic and Security Review Commission
- Nabil, Muhammad. 2014 “*Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Noland, Marcus. 2003 “*Femine and Reform in North Korea*”, diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/aaec/fa5226946fca187917bb30ce58e57124e430.pdf> pada tanggal 15 Januari 2021
- Park dan Kim, 2012. *Understanding North Korea*.
- Perwita dan Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Priandaru , Danur Lambang, “*Korea Utara dapat sanksi internasional , China tetap beli batubara dari Pyongyang*” <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/104402170/korea-utara-dapat-sanksiinternasional-china-tetap-beli-batubara-dari?page=all> (diakses pada 11 Februari 2021).

Roza, Rizki. 2017 “Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Korea Utara” Vol. IX No. 18/II/P3DI/September/2017

T.May Rudy 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung

The Second Round of the Six-Party Talks. (Online).
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/n_korea/6party0402.html diakses pada 3 Januari 2021

Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues.
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/n_korea/6party/talk0406.html Diakses pada 3 Januari 2021

U.S. insistence on “five-party talks” rebuffed.” <http://www.kcna.co.jp> diakses pada 3 Januari 2021

U.S. urged not to fault DPRK’s self-defensive measure.” <http://www.kcna.co.jp> diakses pada 3 Januari 2021

Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, “*The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects*,” Korea Observer, Vol. 39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008)

Yang Seung Yoon & Mohtar Mas’oed, Politik Luar Negeri Korea Selatan “*Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*”, 2004, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, *Politik Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-Pokok Kepentingan dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003)

Yang Seung-Yoon, dan Moehtar Mas’oed. 2005. *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)